



Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun anggaran 2025.

LKjIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur mekanisme evaluasi terhadap implementasi SAKIP guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Secara substansi, LKjIP ini memuat informasi mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2025, yang mencakup capaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu “Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak, baik perangkat daerah, pemangku kepentingan, maupun seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





Sidoarjo serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat pada masa yang akan datang.

Demikian pengantar LKjIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, semoga Tuhan YME senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua.

Sidoarjo, 1 April 2026

Bupati Sidoarjo,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Subandi

Bupati Sidoarjo

Subandi





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo	3
1.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo	3
1.2.2. Kondisi Pemerintah.....	12
1.3. Isu Strategis Daerah.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Visi.....	22
2.2. Misi.....	25
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	28
2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	30
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
2.6. Cascading Kinerja.....	32
2.7. Pohon Kinerja	35
2.8. Peta Proses Bisnis	41
2.9. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	43
3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	45
3.1.2. Tingkat Kemiskinan.....	51
3.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	55
3.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	60
3.1.5. Rasio Gini	64
3.1.6. Indeks Reformasi Birokrasi	67
3.1.7. Indeks Infrastruktur	71
3.1.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	74
3.1.9. Indeks Kesalehan Sosial	77
3.2.1. Analisis Efisiensi Sumber Daya	80

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.*





BAB IV PENUTUP	98
4.1. Kesimpulan	98
4.2. Tindak Lanjut.....	99
BAB V LAMPIRAN.....	101
5.1. Perjanjian Kinerja Perubahan	101
5.2. IKU dan IKD	114
5.3. RPJMD	115
5.4. Penghargaan.....	116





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wilayah Administratif Kabupaten Sidoarjo	5
Tabel 1.2 Luas Wilayah kecamatan Tahun 2025	5
Tabel 1.3 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2025	7
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.5 PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 (dalam Miliar Rupiah)	11
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	16
Tabel 2.7 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo.....	22
Tabel 2.8 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029	25
Tabel 2.9 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.....	28
Tabel 2.10 Prioritas dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	30
Tabel 2.11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo	31
Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	42
Tabel 3.13 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	44
Tabel 3.14 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	45
Tabel 3.15 Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo	47
Tabel 3.16 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di.....	51
Tabel 3.17 Tabel Realisasi Anggaran Per program	82





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo	4
Gambar 1.2 Grafik Tren Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo.....	8
Gambar 2. 1 Cascading Kinerja Misi 1	32
Gambar 2. 2 Cascading Kinerja Misi 2	33
Gambar 2. 3 Cascading Kinerja Misi 3	33
Gambar 2. 4 Cascading Kinerja Misi 4	34
Gambar 2. 5 Cascading Kinerja Misi 5	34
Gambar 2. 6 Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih Berbasis Digital	36
Gambar 2. 7 Pohon Kinerja Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.....	37
Gambar 2. 8 Pohon Kinerja Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.....	38
Gambar 2. 9 Pohon Kinerja Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.....	39
Gambar 2. 10 Pohon Kinerja Masyarakat yang inklusif, Harmonis, Religius, dan Berbudaya.....	40
Gambar 2. 11 Peta Proses Bisnis Kabupaten Sidoarjo	41
Gambar 3.1 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo.....	47
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Dengan Target Akhir RPJMD.....	48
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Dengan Target Akhir RPJMD 2025.....	49
Gambar 3.4 Perbandingan IPM Pemkab Sidoarjo, Provinsi, Nasional	50
Gambar 3.5 Perbandingan Kab. Sidoarjo, Provinsi, Nasional	53
Gambar 3.6 Tren Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo	53
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD 2025.....	54
Gambar 3.8 Tren Presentase TPT Pemkab Sidoarjo	56
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD Agustus 2025.....	57
Gambar 3.10 Perbandingan Kab. Sidoarjo dan Kab./Kota Sekitar Per November 2025.....	58
Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD Kab. Sidoarjo.....	60
Gambar 3.12 Perbandingan Pemkab Sidoarjo, Provinsi Jatim, Nasional	61
Gambar 3.13 Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo.....	62
Gambar 3.14 Tren Indeks Gini.....	64

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.*





Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	
Indeks Gini 2025	65
Gambar 3.16 Perbandingan Pemkab Sidoarjo, Provinsi Jatim, Nasional	66
Gambar 3.17 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD RB.....	68
Gambar 3.18 Tren Indeks Reformasi Birokrasi	68
Gambar 3.19 Tren Indeks Infrastruktur.....	72
Gambar 3.20 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	
Indeks Infrastruktur	73
Gambar 3.21 Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74
Gambar 3.22 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD IKLH	75
Gambar 3.23 Perbandingan Pemkab Sidoarjo, Provinsi Jatim.....	76
Gambar 3.24 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	
Kesalehan Sosial.....	78
Gambar 3.25 Tren Indeks Kesalehan Sosial	79
Gambar 3.26 Perbandingan Pemkab Sidoarjo dan Provinsi Jatim.....	79
Gambar 3.27 Rumus Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran.....	81





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan. Tahun 2025 merupakan terakhir dari periode perencanaan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Secara umum tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021–2026 dapat tercapai dengan baik, dari 6 tujuan yang mencakup 9 indikator dengan rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100,91% atau bermakna SANGAT BAIK.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, 9 Indikator Kinerja Tujuan, 13 Sasaran dan 31 Indikator Kinerja Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran tahun ketiga (2023) periode perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tidak Tercapai
2	Tingkat Kemiskinan	Tercapai
3	Pertumbuhan Ekonomi	Tidak Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tercapai
5	Rasio Gini	Tercapai
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Tidak Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





7	Indeks Infrastruktur	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tidak Tercapai
9	Indeks Kesalehan Sosial	Tercapai

Berdasarkan dengan ketercapaian indikator tujuan dan sasaran diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Hasil analisis pencapaian terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, diketahui 9 (sembilan) indikator dalam katagori Sangat Baik. Jika diratarata capaian kinerja tujuan tercapai 100,91% atau Sangat Baik.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas tersebut, pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai sistem manajemen kinerja yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP pertama kali diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta review atas laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LKjIP juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam





rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, LKjIP juga menjadi instrumen evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai bagian dari kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam sektor industri, perdagangan, jasa, serta pengembangan kawasan perkotaan. Namun demikian, dinamika pembangunan daerah juga dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing ekonomi daerah, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kinerja pemerintahan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, dengan visi pembangunan daerah yaitu **“Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”** Visi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendorong pembangunan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut harus didukung dengan sistem pengukuran kinerja yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.





Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 menjadi sangat penting sebagai sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

1.2. Penjelasan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

1.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kawasan metropolitan Surabaya serta wilayah pengembangan Gerbangkertosusila. Letak wilayah yang berdekatan dengan Kota Surabaya menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, industri, perdagangan, serta jasa di Provinsi Jawa Timur.

Sebagai daerah yang berkembang pesat, Kabupaten Sidoarjo memiliki dinamika pembangunan yang cukup tinggi. Perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, serta peningkatan aktivitas ekonomi menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

1.2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo secara geografis terletak di bagian utara wilayah Provinsi Jawa Timur dan merupakan daerah yang berada dalam kawasan metropolitan Surabaya. Letak wilayah Kabupaten Sidoarjo sangat strategis karena berada pada jalur utama transportasi yang menghubungkan wilayah Surabaya dengan wilayah Jawa Timur bagian selatan dan timur.

Secara administratif, Kabupaten Sidoarjo memiliki batas wilayah sebagai berikut:





- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Selat Madura

Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah sekitar 719,34 km² yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah pesisir. Wilayah pesisir yang berada di bagian timur kabupaten dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perikanan, tambak, serta kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis sumber daya pesisir.

Secara topografis, wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0–25 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menjadikan wilayah Kabupaten Sidoarjo sangat potensial untuk pengembangan kawasan permukiman, kawasan industri, perdagangan, serta kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga dilalui oleh beberapa sungai besar yang memiliki peran penting dalam sistem pengairan dan pengendalian banjir, antara lain Sungai Brantas dan Sungai Porong. Sungai-sungai tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pertanian, pengendalian banjir, serta pengelolaan lingkungan wilayah.

Gambar 1.3 Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo



Sumber : <https://public.tableau.com>

Peta wilayah tersebut menunjukkan pembagian wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari beberapa kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, baik di kawasan perkotaan, kawasan industri, maupun kawasan pesisir.





Secara administratif, wilayah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa kecamatan, desa, dan kelurahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Wilayah Administratif Kabupaten Sidoarjo

No	Wilayah Administratif	Jumlah
1.	Kecamatan	18
2.	Kelurahan	31
3.	Desa	322

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2026

Dengan struktur wilayah administratif tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah dapat berjalan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km² yang terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa dan 28 Kelurahan.

Tabel 1.2 Luas Wilayah kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Tarik	Mergosari	39,73
2	Prambon	Prambon	29,89
3	Krembung	Mojaruntut	27,90
4	Porong	Juwetkenongo	30,71
5	Jabon	Dukuhsari	82,92
6	Tanggulangun	Kalitengah	29,78
7	Candi	Gelam	42,86
8	Tulangan	Kenongo	31,31
9	Wonoayu	Wonoayu	30,29
10	Sukodono	Anggaswangi	32,85
11	Sidoarjo	Sidokumpul	62,03
12	Buduran	Banjarkemantren	43,65
13	Sedati	Pulungan	79,23





14	Waru	Janti	30,59
15	Gedangan	Keboansikep	24,01
16	Taman	Bebekan	31,36
17	Krian	Kraton	25,89
18	Balongbendo	Wonokupang	44,34
JUMLAH			719,34

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2026

Berdasarkan data diatas, kecamatan dengan wilayah terluas berada di Kecamatan Sedati (79,23 km²), diikuti Kecamatan Sidoarjo (62,03 km²), dan Kecamatan Buduran (43,65 km²). Sementara itu, kecamatan dengan luas relatif kecil seperti Gedangan (24,01 km²) dan Krian (25,89 km²) memiliki karakteristik wilayah yang lebih padat.

Pada periode musim penghujan bulan Januari sampai Maret dan bulan November sampai Desember, tingginya curah hujan berpotensi memberikan dampak yang berbeda pada tiap kecamatan, tergantung luas wilayah dan kondisi geografisnya. Kecamatan dengan wilayah luas seperti Sedati dan Sidoarjo cenderung memiliki cakupan area genangan atau potensi banjir yang lebih besar, terutama jika didukung oleh kondisi topografi rendah dan kedekatan dengan wilayah pesisir. Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah lebih kecil namun padat penduduk tetap memiliki risiko tinggi, terutama pada aspek drainase dan kepadatan permukiman.

Memasuki musim kemarau bulan Juli sampai September, di mana curah hujan sangat rendah dan penyinaran matahari tinggi, wilayah dengan luasan besar berpotensi mengalami kekeringan yang lebih luas, terutama pada lahan pertanian atau tambak seperti di wilayah Sedati, Jabon, dan sekitarnya. Sementara itu, kecamatan yang lebih urban seperti Waru, Taman, dan Gedangan cenderung menghadapi dampak berupa peningkatan suhu dan kebutuhan air bersih.





Tabel 1.3 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2025

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	449,0	22	41,0
Februari	379,0	18	51,0
Maret	354,0	21	53,0
April	392,0	12	65,0
Mei	516,0	19	63,0
Juni	73,0	4	75,0
Juli	14,0	3	90,0
Agustus	36,0	4	93,0
September	3,0	1	91,0
Oktober	51,0	7	72,0
Nopember	535,0	21	41,0
Desember	321,0	17	55,0

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2026

Jika dibandingkan dengan total luas wilayah sebesar 719,34 km², jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mencapai 2.041.260 jiwa, terdiri dari 1.022.252 laki-laki dan 1.019.008 perempuan. Maka secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo tergolong tinggi.

1.2.1.2. Kondisi Demografis

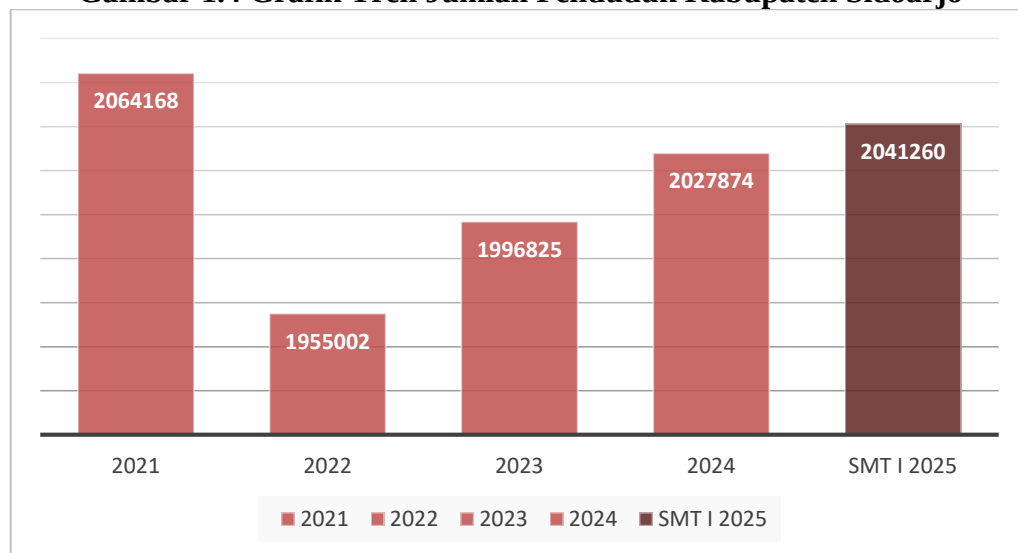
Kondisi demografis merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dinamika kependudukan yang meliputi jumlah penduduk, struktur umur, persebaran penduduk, serta kondisi ketenagakerjaan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan publikasi Sidoarjo Dalam Angka 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo telah mencapai





lebih dari 2 juta jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Jika dikaitkan dengan data persebaran penduduk per kecamatan, peningkatan jumlah penduduk ini berimplikasi langsung terhadap tingkat kepadatan wilayah, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk besar seperti Taman, Waru, dan Sidoarjo. Wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami tekanan yang lebih tinggi terhadap ketersediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta kebutuhan hunian.

Gambar 1.4 Grafik Tren Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 serta grafik perkembangan penduduk tahun 2021 hingga Semester I 2025, terlihat adanya dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada grafik tersebut, jumlah penduduk tahun 2021 tercatat sebesar 2.064.168 jiwa, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 1.955.002 jiwa. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor administratif maupun dinamika mobilitas penduduk. Selanjutnya, jumlah penduduk kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.996.825 jiwa dan terus bertambah pada tahun 2024 sebesar 2.027.874 jiwa. Hingga Semester I tahun 2025, jumlah penduduk mencapai 2.041.260 jiwa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





Secara keseluruhan, tren peningkatan jumlah penduduk sejak tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan adanya pertumbuhan yang perlu diantisipasi melalui perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terutama dalam penyediaan layanan dasar, pengendalian tata ruang, serta pemerataan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Taman (204.244 jiwa), Waru (196.356 jiwa), dan Sidoarjo (201.241 jiwa). Jika dilihat dari luas wilayahnya, kecamatan-kecamatan ini tidak termasuk yang paling luas, sehingga menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan perkotaan atau penyangga kota dengan aktivitas ekonomi dan permukiman yang padat. Sebaliknya, Kecamatan Sedati yang memiliki luas wilayah terbesar (79,23 km²) memiliki jumlah penduduk sebesar 98.580 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di wilayah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lain yang lebih kecil namun berpenduduk lebih banyak. Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan lahan seperti tambak atau kawasan pesisir yang tidak seluruhnya digunakan sebagai permukiman.

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2025**

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	TARIK	34.401	33.845	68.246
2	PRAMBON	40.517	39.552	80.069
3	KREMBUNG	34.783	34.690	69.473
4	PORONG	35.681	35.145	70.826
5	JABON	28.187	27.895	56.082
6	TANGGULANGIN	44.460	44.367	88.827
7	CANDI	79.526	79.564	159.090
8	TULANGAN	51.968	51.646	103.614
9	WONOAYU	43.475	42.653	86.128
10	SUKODONO	63.787	63.035	126.822





11	SIDOARJO	99.721	101.520	201.241
12	BUDURAN	51.048	51.164	102.212
13	SEDATI	49.413	49.167	98.580
14	WARU	97.154	99.202	196.356
15	GEDANGAN	60.414	60.354	120.768
16	TAMAN	102.208	102.036	204.244
17	KRIAN	67.608	66.318	133.926
18	BALONGBENDO	37.901	36.855	74.756
JUMLAH		1.022.252	1.019.008	2.041.260

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026

Dari sisi struktur penduduk, komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh kelompok usia produktif. Kondisi ini memberikan potensi besar bagi pembangunan daerah karena kelompok usia produktif merupakan tenaga kerja utama yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan penduduk usia produktif tersebut menjadi modal penting dalam mendukung perkembangan berbagai sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, jasa, serta sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang berkembang pesat di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam konteks pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 tercatat sebesar **83,35**, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 82,68. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan. Pada Tahun 2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar **4,40** persen, lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,54 persen.

Sedangkan dari aspek ketenagakerjaan, kondisi pasar kerja di Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2025 tercatat sebesar **5,75** persen, lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 6,48 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor industri, perdagangan, dan jasa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo.





Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 sebesar **5,63%**, mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang pertumbuhannya sebesar 5,54%. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Sidoarjo dihasilkan oleh Industri Pengolahan yakni mencapai 49,45%, meningkat 0,88% dari tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan pengeluaran, PDRB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 didominasi oleh pengeluaran rumah tangga serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berturut-turut yakni sebesar **53,63%** dan **29,99%**. Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha tahun 2025 berdasarkan angka sementara, sebagai berikut :

Tabel 1.5 PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Sektor	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.525,21	2.805,35
2	Pertambangan dan Penggalian	82,78	45,00
3	Industri Pengolahan	157.853,46	94.099,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.318,76	1.849,93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	163,52	129,35
6	Konstruksi	21.430,64	13.922,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	49.980,79	27.907,63
8	Transportasi dan Pergudangan	42.488,63	13.369,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.753,97	6.887,06
10	Informasi dan Komunikasi	10.303,88	8.881,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.412,98	1.865,65

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





12	Real Estate	2.498,21	1.667,97
13	Jasa Perusahaan	475,60	278,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.887,51	2.526,35
15	Jasa Pendidikan	3.107,20	1.968,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	933,09	596,52
17	Jasa Lainnya	1.029,47	625,50
TOTAL		319.245,71	179.425,45

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026

Secara umum, kondisi demografis Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pembangunan manusia, menurunnya tingkat kemiskinan, serta membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan pembangunan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil, diharapkan kondisi demografis Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi salah satu faktor pendorong dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu “Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

1.2.2. Kondisi Pemerintah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut:





a. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli dimaksud antara lain:

- 1) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
- 2) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
- 3) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM

b. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

c. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;

d. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan;
- 3) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
- 4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

f. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;





- 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;
- 4) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan, pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi, serta sub urusan penataan ruang;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;





- 13) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 15) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 19) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Sedangkan pada Kecamatan, yang terdiri dari 18 kecamatan.





1.2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak **13.320** orang yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

No.	PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL		PELAKSANA		TOTAL		TOTAL ASN
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Sekretariat Daerah	15	36	14	73	9	124	23	147
2	Sekretariat Dprd	6	9	3	38	4	53	7	60
3	Inspektorat Daerah	7	52	1	16	0	75	1	76
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	16	3372	3675	315	2	3703	3677	7.380
5	Dinas Kesehatan	32	1081	473	156	20	1269	493	1.762
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	8	11	15	55	23	74	38	112
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	8	9	8	23	7	40	15	55
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10	52	0	14	32	76	32	108
9	Dinas Sosial	5	4	0	9	5	18	5	23
10	Dinas Tenaga Kerja	6	15	1	9	3	30	4	34
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6	4	0	12	3	22	3	25
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	6	2	4	10	1	18	5	23
13	Dinas Pangan Dan Pertanian	7	44	47	36	7	87	54	141
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	9	12	3	187	9	208	12	220
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6	11	7	19	3	36	10	46
16	Dinas Perhubungan	17	14	0	41	20	72	20	92
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4	12	12	32	0	48	12	60
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	6	2	1	20	0	28	1	29
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	6	1	13	19	24	20	44
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	6	3	0	33	4	42	4	46
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	12	0	11	13	29	13	42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





22	Dinas Perikanan	6	5	0	18	2	29	2	31
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8	10	1	106	10	124	11	135
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	14	2	24	2	44	4	48
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6	6	3	48	0	60	3	63
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	5	7	0	66	1	78	0	78
27	Badan Kepegawaian Daerah	7	19	1	37	1	63	2	65
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4	1	0	11	2	16	2	18
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	41	51	5	57	46	103
30	Rsud R.T. Notopuro Sidoarjo	24	414	735	87	0	525	735	1.260
31	Kecamatan Sidoarjo	48	1	8	32	23	81	31	112
32	Kecamatan Candi	6	1	0	10	1	17	1	18
33	Kecamatan Buduran	8	1	1	10	1	19	2	21
34	Kecamatan Gedangan	7	1	0	8	1	16	1	17
35	Kecamatan Sedati	8	1	0	10	1	19	1	20
36	Kecamatan Waru	6	1	1	12	2	19	3	22
37	Kecamatan Taman	33	1	3	23	16	57	19	76
38	Kecamatan Sukodono	8	0	1	10	1	18	2	20
39	Kecamatan Wonoayu	5	1	0	12	1	18	1	19
40	Kecamatan Krian	19	1	0	17	8	37	8	45
41	Kecamatan Balongbendo	7	1	0	15	1	23	1	24
42	Kecamatan Tarik	5	1	0	15	1	21	1	22
43	Kecamatan Tulangan	8	1	0	10	1	19	1	20
44	Kecamatan Prambon	5	1	1	16	1	22	2	24
45	Kecamatan Krembung	3	1	0	10	1	14	1	15
46	Kecamatan Tanggulangin	8	1	0	12	1	21	1	22
47	Kecamatan Jabon	7	0	0	9	1	16	1	17
48	Kecamatan Porong	18	0	0	15	8	33	8	41
49	Rsud Sidoarjo Barat	12	133	171	23	0	168	171	339
TOTAL		422	798	42	817	183	7710	5510	13.220

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara tersebut sudah cukup untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Peningkat kualitas SDM terus dilakukan peningkatan baik dari segi softskill maupun hardskill dari aparatur dengan harapan kedepan akan adanya peningkatan secara bertahap dari segi kualitas/kompetensi SDM.

1.3. Isu Strategis Daerah

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Belum terselenggaranya tata kelola Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital;

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
 - a. Mewujudkan good governance melalui pengelolaan pemerintahan yang Tangkas, Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
 - b. Penguatan komitmen ASN, penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis Information and Communication Technology (ICT).
 - c. Pengembangan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
 - d. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi.
 - f. Meningkatkan kualitas tatakelola dan kemandirian Desa.
2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Pengembangan Investasi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan.
 - a. Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro,
 - b. Memperluas Lapangan Kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha.
 - c. Penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.





- d. Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas unggulan lokal yang halal dan mampu berdaya saing serta berkelanjutan.
 - e. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
 - f. Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis dan industry kreatif.
 - g. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
 - h. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuh kembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro.
 - i. Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistem ketahanan pangan daerah.
3. Pemantapan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berkarakter. Pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Berbagai variable yang dapat mengilustrasikan isu ini bagi kabupaten Sidoarjo antara lain;
- a. Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan yang memiliki daya saing regional dan memiliki karakter budi pekerti yang baik.
 - b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
 - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
 - d. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata.
 - e. Pengelolaan potensi dan peningkatan peran pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.





- f. Cakupan layanan jaminan Pendidikan dan Kesehatan, kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
 - g. Prioritas implementasi pencapaian target SDGs pada indikator 1 sampai dengan nomor 9 dan nomor 11, yaitu menyangkut, kemiskinan, sanitasi lingkungan dan tata kota.
 - h. Meningkatkan kestaraan dan kehidupan yang inklusif bagi disabilitas dan seluruh elemen masyarakat.
4. Penataan Kota, Implementasi Sistem Transportasi Terpadu dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
- a. Penyediaan sarana prasarana umum antara lain; RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, dan ruang publik lainnya.
 - b. Pengembangan transportasi massal bagi orang dan barang yang dapat mengatasi kemacetan.
 - c. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
 - d. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan 100% sanitasi,
 - e. Sistem pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif dan efisien serta berkelanjutan.
 - f. Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Pengembangan Wilayah Berbasis Keterkaitan antar Daerah yang Mendukung Percepatan Sektor Strategis.
- a. Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa.
 - b. Optimalisasi kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo guna menguatkan konektivitas pembangunan antar wilayah,
 - c. Integrasi pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung pemantapan Sektor Utama yaitu Perdagangan dan Industri,





- d. Integrasi pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan Sektor Strategis, yaitu pariwisata, pertanian modern, perikanan dan jasa.
 - e. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
 - f. Percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis pendukung sector pertanian dan perikanan.
6. Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat dan Harmoni Sosial yang berbasis Kesenjangan, Keamanan dan Ketertarikan.
- a. Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
 - b. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll.
 - c. Penanganan terhadap dampak bencana geologi lumpur Sidoarjo, antara lain penurunan tanah, banjir dan dampak lain yang ditimbulkan.
 - d. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, perlindungan terhadap kaum disabilitas, anti diskriminasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
 - e. Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
 - f. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertarikan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan arah yang jelas agar hasilnya efektif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing. Dengan memperhatikan potensi daerah, sekaligus tantangan dan ancaman di masa depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama masyarakat telah merumuskan visi, misi, serta strategi sebagai pedoman pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026, sebagai berikut:

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo di masa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah :

**” TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU,
BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN ”**

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan

<i>Sejahtera, Maju, Ber karakter dan Berkelanjutan”</i>	keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
<i>Sidoarjo Maju</i>	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo disegala bidang.



	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip- prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

2.2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.8 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasadani Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	<i>Sidoarjo Maju</i>	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
	<i>Sidoarjo Berkarakter</i>	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	<i>Pembangunan Berkelanjutan</i>	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029



Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan 5 misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun 2025-2029 yang disebut sebagai **PANCA KARYA DELTA**. Penjelasan atas 5 Misi **PANCA KARYA DELTA** diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo.



Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagikelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (humanresources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasarlainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertibtentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 - 2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
PANCA KARYA DELTA I Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia
		Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata	Usia Harapan Hidup (UHH)
		Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Harapan Lama Sekolah
	Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo		Tingkat Kemiskinan
		Mewujudkan Jaminan Sosial Masyarakat yang Adaptif dan Merata	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index)
PANCA KARYA DELTA II Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi
			Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya Derajat Integrasi Ekonomi Daerah	Ekspor Barang dan Jasa

		Dengan Nasional dan Global	
		Terselenggaranya Ekonomi Hijau dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau
		Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan yang didukung Iklim Usaha Kondusif, Berkembangnya Usaha Mikro dan pertumbuhan sektor primer, Industri Kecil, BUMD melalui Pemanfaatan Ipteks yang berkontribusi dalam Menyerap Tenaga Kerja	Rasio PDRB Industri Pengolahan
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
			Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
	Menurunnya Ketimpangan Wilayah		Rasio Gini
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Pemerataan Wilayah
			Indeks Desa
PANCA KARYA DELTA III Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata		Indeks Infrastruktur Daerah
		Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah melalui Kualitas Infrastruktur yang Merata	ICOR
			Realisasi Investasi
PANCA KARYA DELTA IV Meningkatnya Kualitas Lingkungan Resiliensi Bencana	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kualitas Lingkungan Hidup yang Lebih Baik	Penurunan Emisi GRK Kumulatif
		Mewujudkan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)
PANCA KARYA DELTA V Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram dan Nyaman	Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta		Indeks Kesalehan Sosial
		Meningkatnya Ketentraman, Rasa Aman dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Rasa Aman
		Mewujudkan Masyarakat yang Setara	Indeks Toleransi
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tema pembangunan Tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang kemudian disesuaikan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Sebagaimana Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, adalah “Pengembangan Kerjasama Lintas Daerah yang memposisikan Sidoarjo sebagai Penyedia Logistik Regional dan Nasional bertumpu pada Potensi Daerah, Kesiapan SDM yang Unggul serta Berdaya Saing untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan,” dimana Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Prioritas dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Prioritas RKPD Tahun 2025	Arah Kebijakan Tahun 2025
Intensifikasi kerjasama dan penyelarasan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru;	Pengembangan Kerja Sama Lintas Daerah yang Memposisikan Sidoarjo sebagai Penyedia Logistik Regional dan Nasional Bertumpu Pada Kesiapan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.
Optimalisasi peran Sidoarjo sebagai penyedia logistik nasional dan regional melalui peningkatan Industri, dan Surplus Perdagangan Antar Daerah (Regional Trade Surplus) serta Surplus Perdagangan Internasional (Net Export) guna mempercepat penanggulangan pengangguran;	
Implementasi kebijakan yang mendukung berkembangnya perikanan, pertanian, ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan Koperasi dan Usaha Mikro hingga level desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan;	

Penguatan Kapasitas SDM Berkarakter yang unggul utamanya bidang kesehatan dan pendidikan serta kompetensi Angkatan Kerja yang match dengan kebutuhan sektor swasta (user);
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan.

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2025-2029 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Utama
1.	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Petumbuhan Ekonomi
3.	Indeks Gini
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5.	Persentase Penduduk Miskin
6.	Indeks Infrastruktur
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

8.	Indeks Pembangunan Manusia
9.	Indeks Kesalehan Sosial

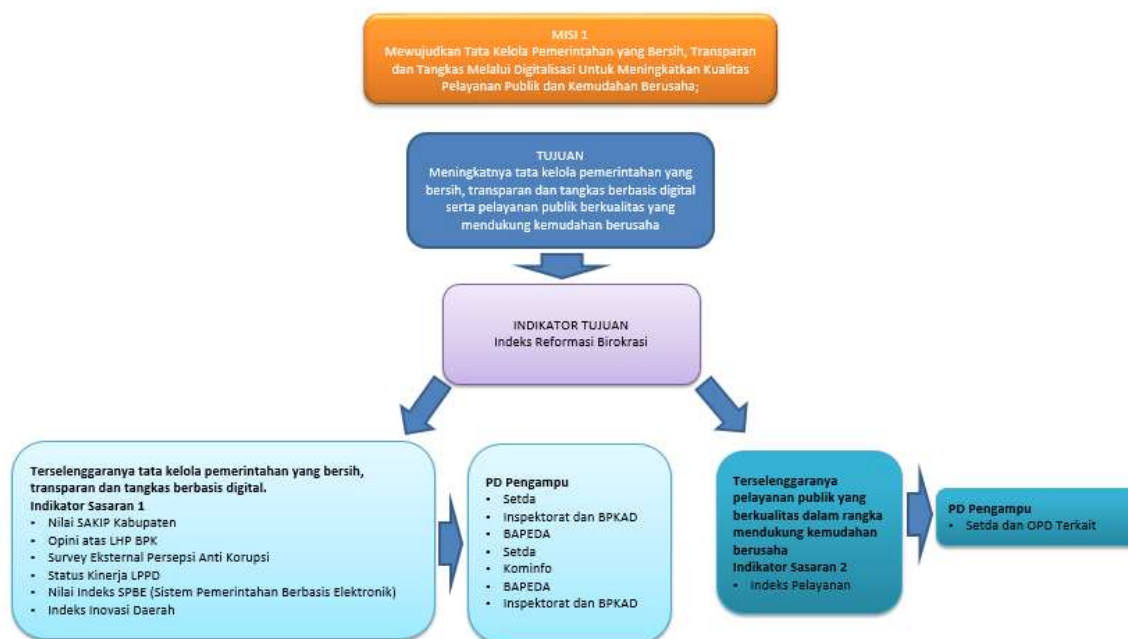
Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

2.6. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Sidoarjo menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

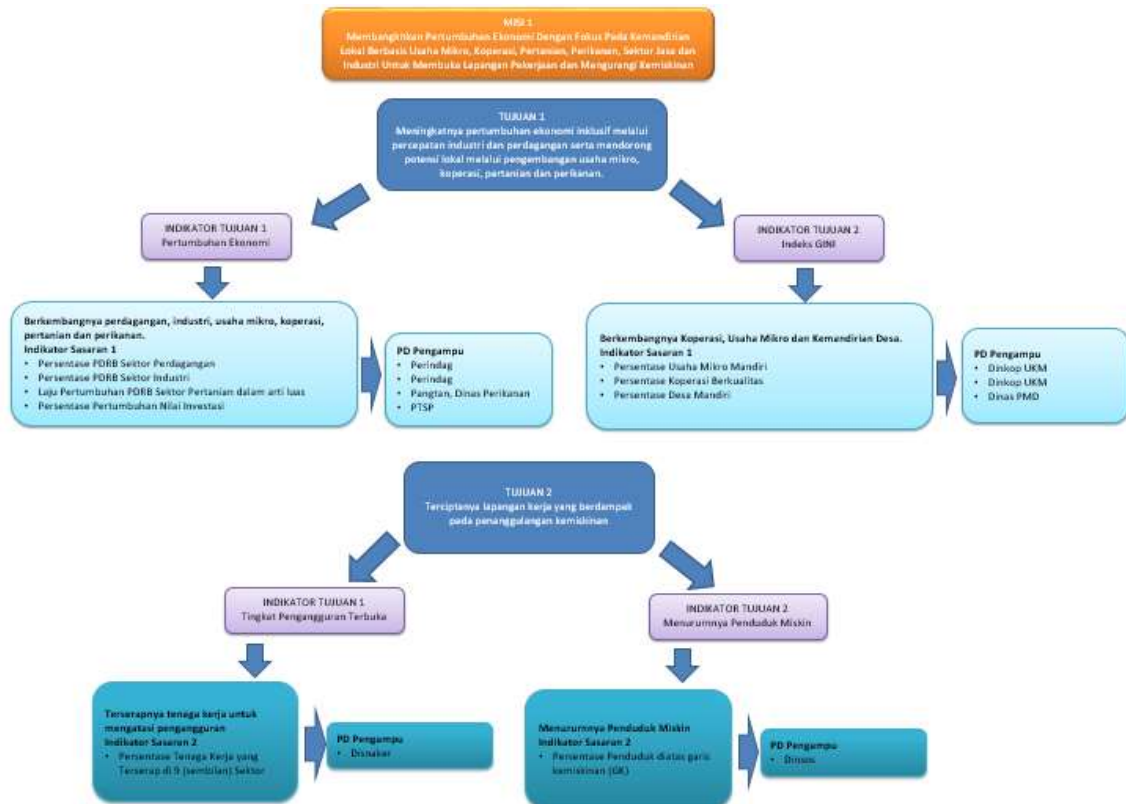
Gambar 2. 12 Cascading Kinerja Misi 1

a) Cascading Kinerja Misi 1



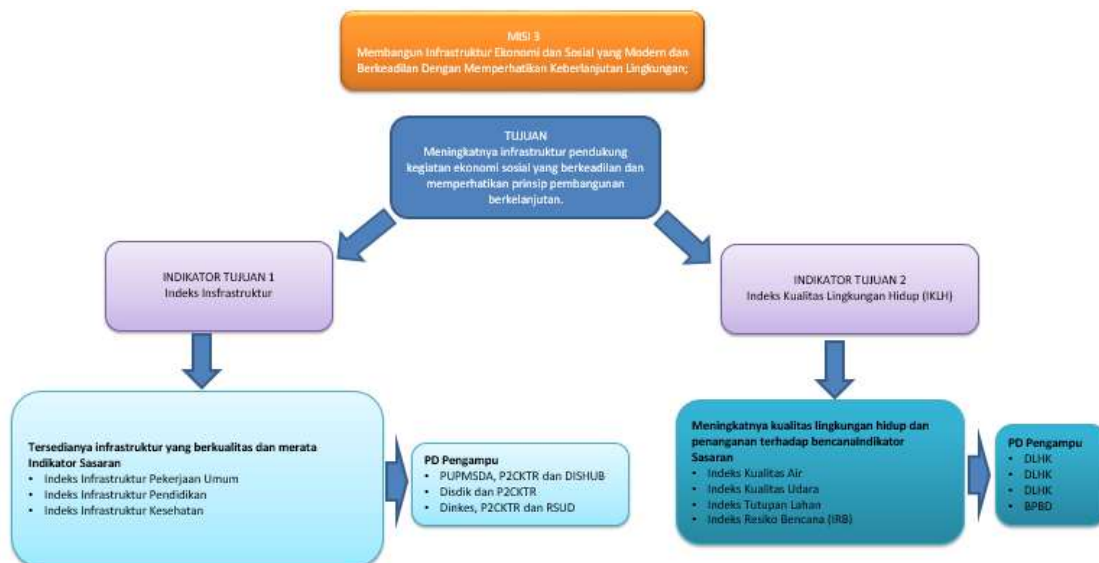
Gambar 2. 13 Cascading Kinerja Misi 2

b) Cascading Kinerja Misi 2



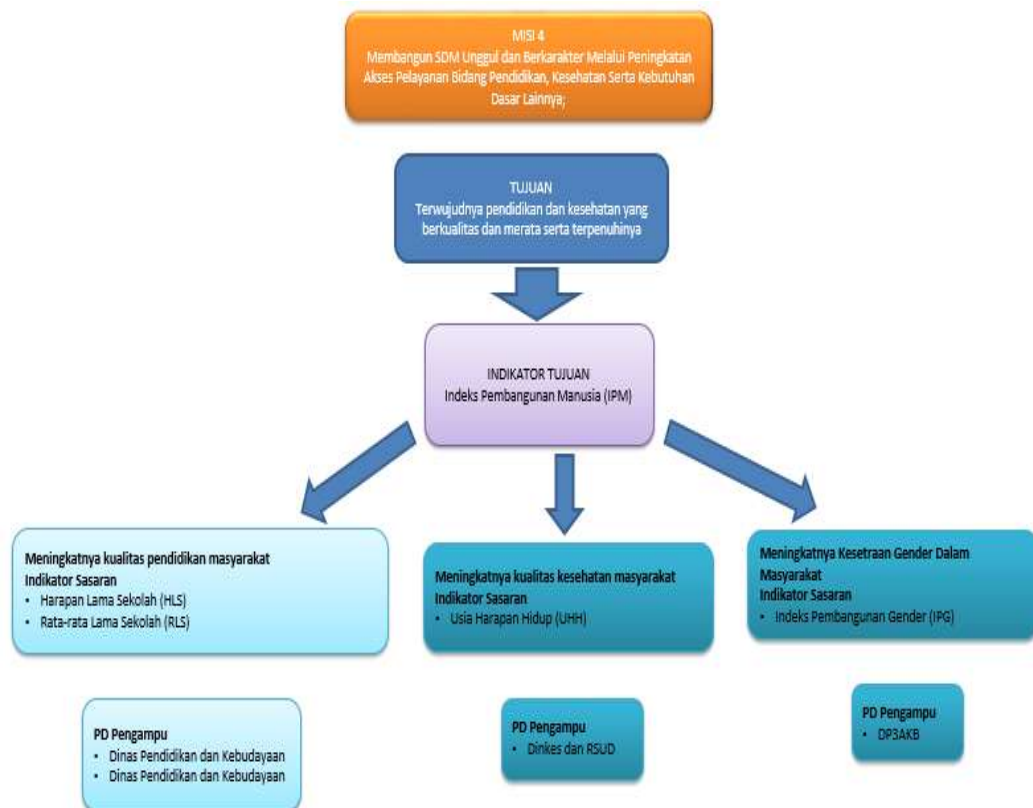
Gambar 2. 14 Cascading Kinerja Misi 3

c) Cascading Kinerja Misi 3

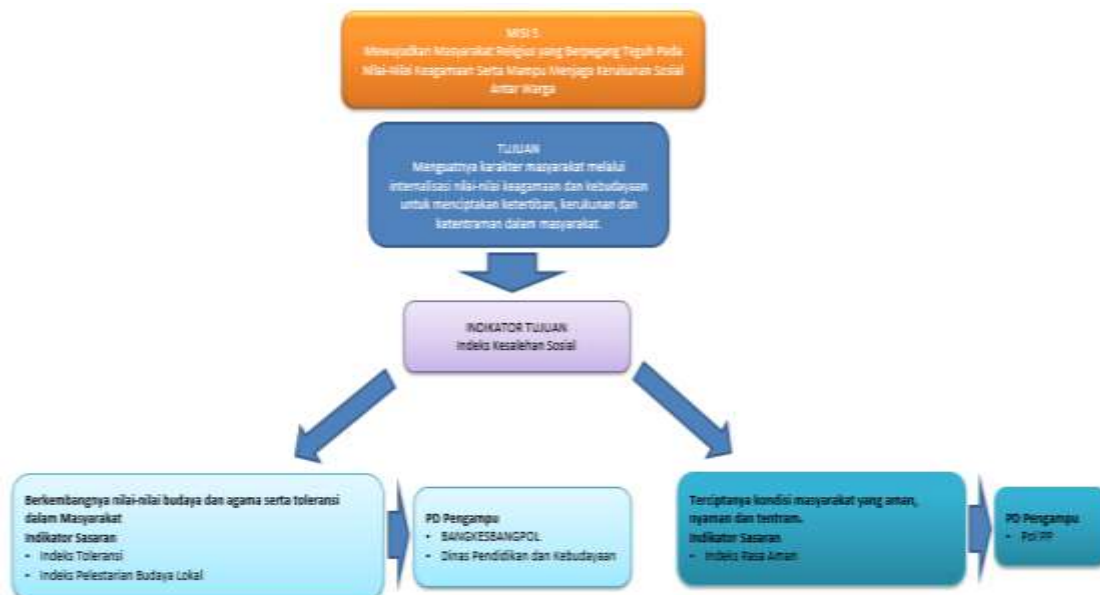


Gambar 2. 15 Cascading Kinerja Misi 4

d) Cascading Kinerja Misi 4



Gambar 2. 16 Cascading Kinerja Misi 5

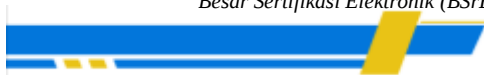


e) Cascading Kinerja Misi 5



2.7. Pohon Kinerja

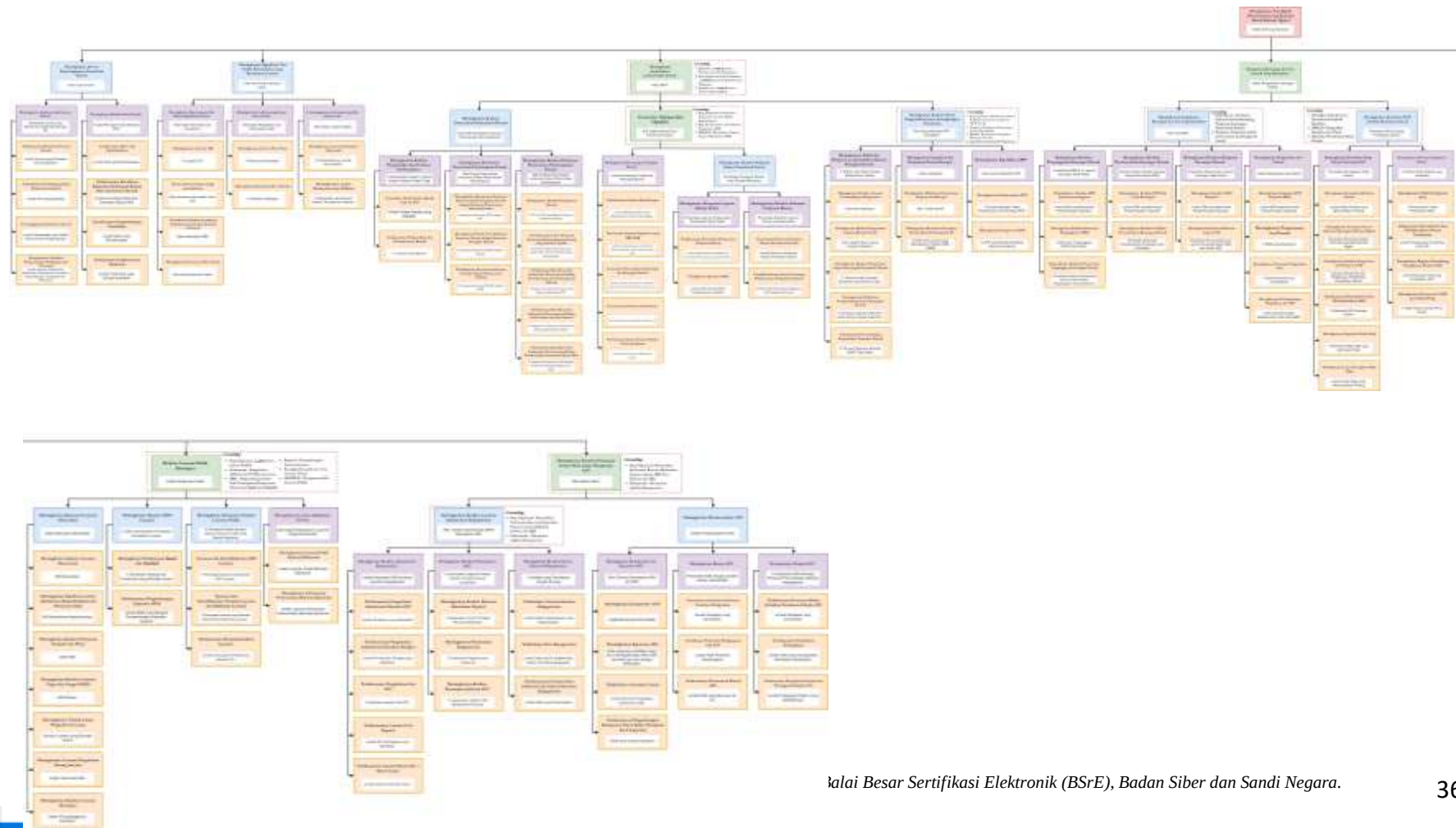
Pohon kinerja di Kabupaten Sidoarjo merupakan alat manajemen yang digunakan untuk menggambarkan hubungan logis antara tujuan pembangunan daerah dengan sasaran, program, hingga kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Melalui pohon kinerja, setiap tujuan strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat diturunkan secara sistematis menjadi indikator kinerja yang terukur dan selaras antar level organisasi. Dengan adanya pohon kinerja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, pohon kinerja juga menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja dan evaluasi SAKIP, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pohon Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam gambar dibawah:





A. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih Berbasis Digital

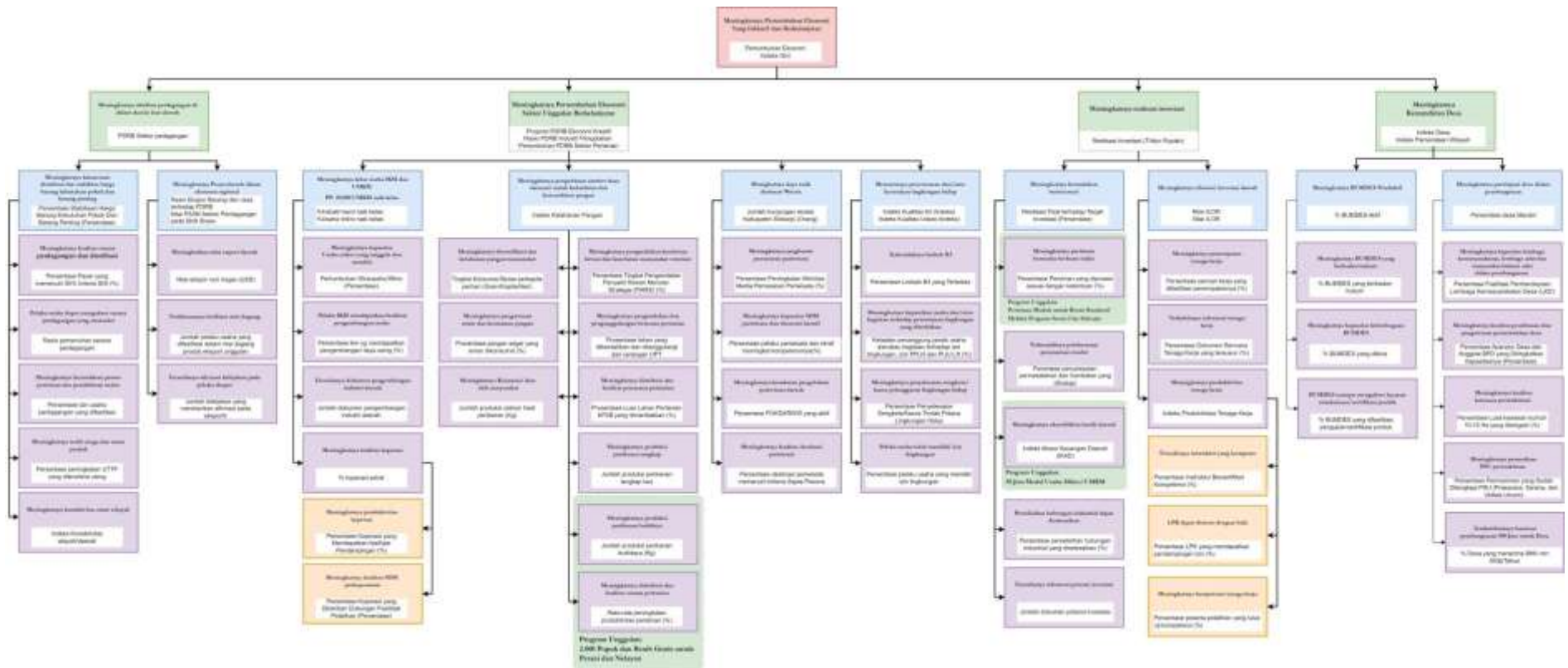
Gambar 2. 17 Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih Berbasis Digital





B. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Gambar 2. 18 Pohon Kinerja Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



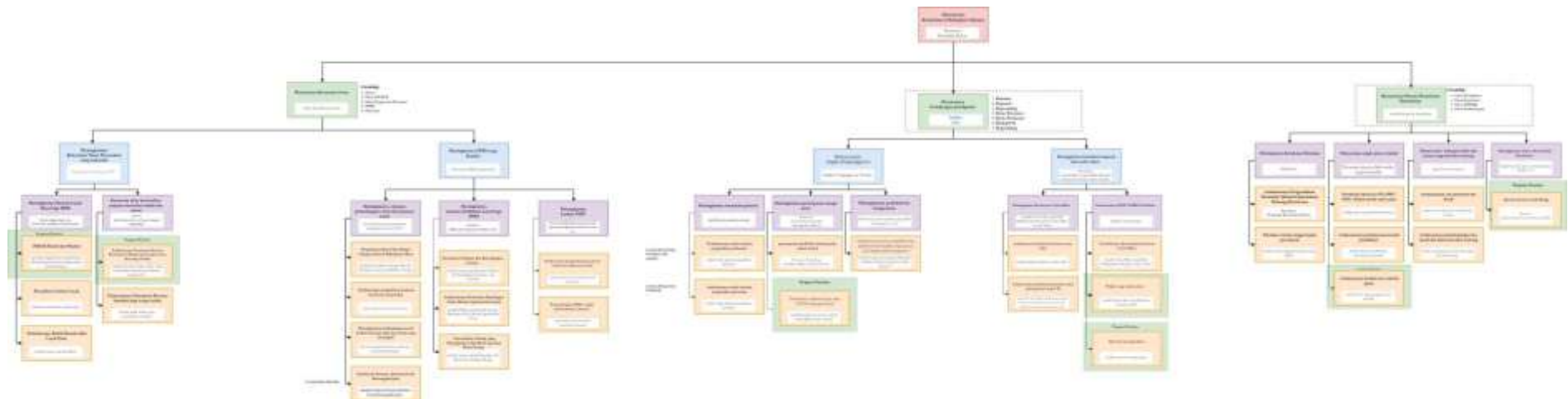
C.





D. Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

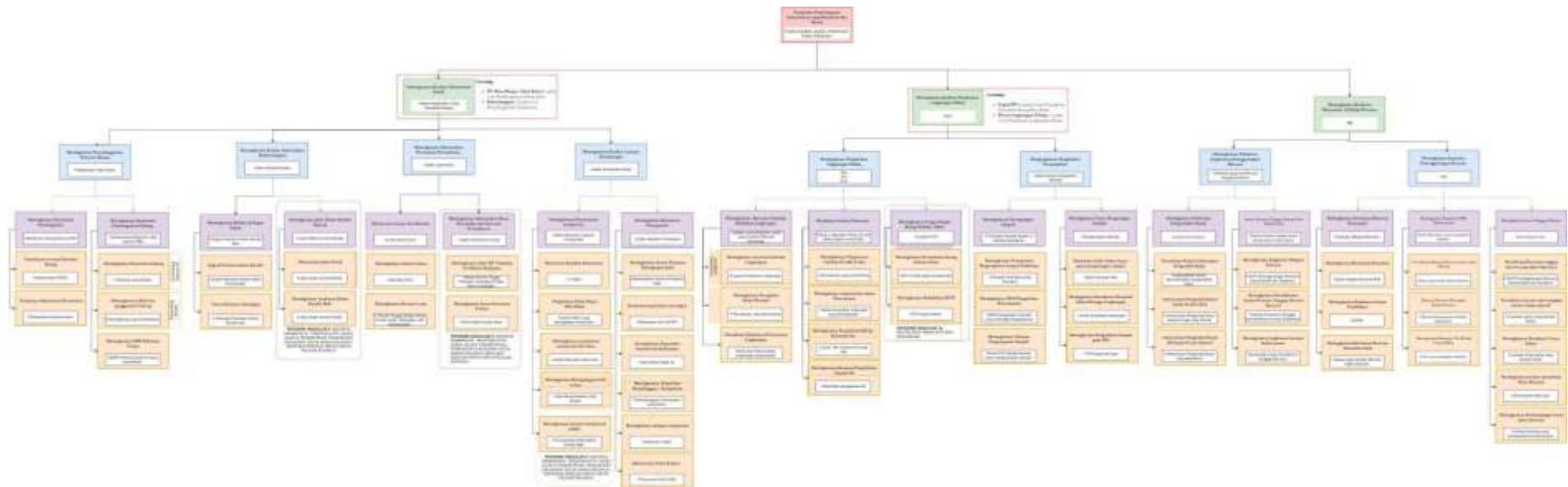
Gambar 2. 19 Pohon Kinerja Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo





E. Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

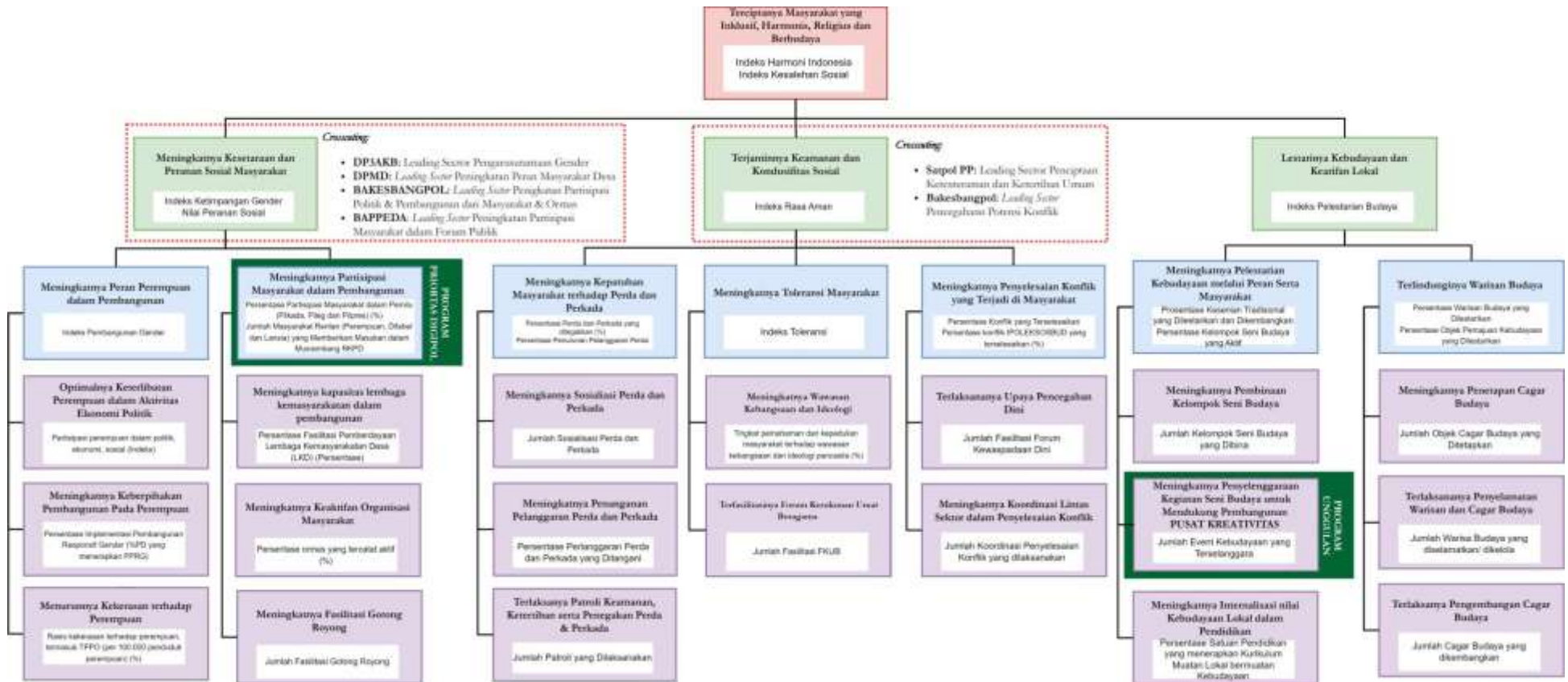
Gambar 2. 20 Pohon Kinerja Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata





F. Terciptanya Masyarakat yang inklusif, Harmonis, Religius, dan Berbudaya

Gambar 2. 21 Pohon Kinerja Masyarakat yang inklusif, Harmonis, Religius, dan Berbudaya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



2.8. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis maka akan mudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standart pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut diagram alur dari peta proses bisnis Kabupaten Sidoarjo baik BPMN (Bisnis Proses Model dan Notasi) maupun diagram level / tingkatannya. Bisnis Proses Model dan Notasi:

Gambar 2. 22 Peta Proses Bisnis Kabupaten Sidoarjo



2.9. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

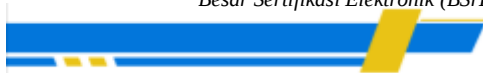
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.



Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	83,51
2.	Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo	Tingkat Kemiskinan	4,52%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka	6,00% 6,48%
4.	Menurunnya Ketimpangan Wilayah	Rasio Gini	0,326
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Digital	Indeks Reformasi Birokrasi	87
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata	Indeks Infrastruktur Daerah	0,858
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,08
8.	Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta Berkebudayaan	Indeks Kesalehan Sosial	87,35

Sumber Data : Dokumen PK Perubahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kewajiban Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 menetapkan Visi : **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”** , didukung 5 Misi dan 6 Tujuan, 13 Sasaran Strategis, 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Hasil penyelenggaraan pembangunan dijabarkan dalam 23 urusan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 17 urusan wajib pelayanan non dasar), 6 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang telah dipetakan dalam Tujuan dan indikator Tujuan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025. Dalam Laporan kinerja ini yang akan disajikan hanya 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.

Formulasi pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:





- Indikator positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaian kinerjanya, dengan rumus =

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

Presentase Capaian Kinerja =

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 90,01%	Sangat Baik
2	80,01% s.d 90%	Baik
3	70,01% s.d 80%	Cukup
4	Kurang dari 70%	Kurang

Sumber: PERBUP NO. 06 Tahun 2021

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Sidoarjo Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Sidoarjo merupakan kinerja tahun ke-5 pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja tujuan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah 100,79% Adapun data detail hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut:





Tabel 3.14 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2022	2023	2024	2025			Ket
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	81,02	81,88	82,67	83,51	83,35	99,81%	Tidak Tercapai
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,36	5	4,53	4,52	4,4	102,73%	Tercapai
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,53	6,16	5,54	6	5,63	93,83%	Tidak Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,8	8,05	6,49	6,48	5,75	112,70%	Tercapai
5	Rasio Gini	Poin	0,373	0,359	0,327	0,326	0,316	103,16%	Tercapai
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68,88	75,38	86,47	87	86,71	99,67%	Tidak Tercapai
8	Indeks Infrastruktur	Poin	0,792	0,843	0,85	0,858	0,86	100,23%	Tercapai
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,54	58,99	86,47	65,08	62,37	95,84%	Tidak Tercapai
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	84,23	85,15	87,330	87,35	87,52	100,19%	Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas, untuk 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025, adalah sebagi berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator.

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia





(IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

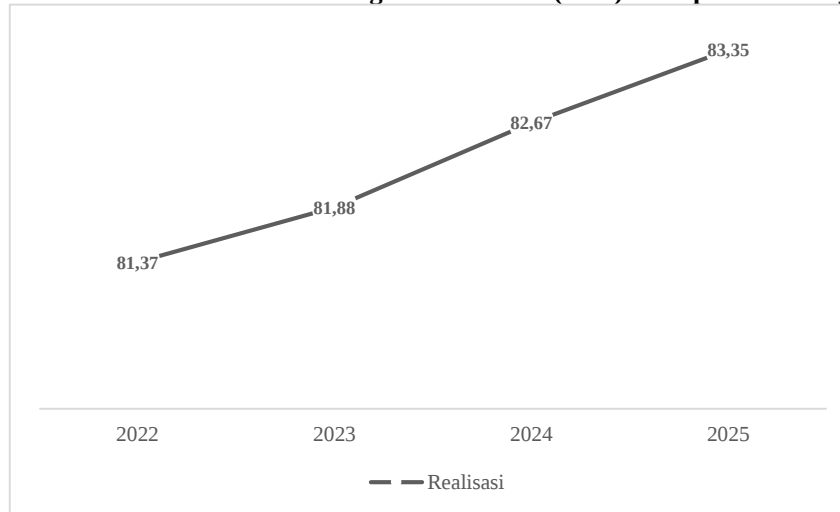
Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pembangunan manusia di Sidoarjo terus mengalami kemajuan. Sejak Tahun 2021, status pembangunan manusia Sidoarjo sudah berada di level “sangat tinggi”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 mencapai 83,35 dari target 83,51 atau mencapai target dengan capaian 100,81%. Apabila dibanding dengan capaian Tahun 2024 yaitu 82,67 maka terdapat kenaikan 0,68 poin atau sekitar 0,82%. Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota. Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :





Grafik 3.1 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Dimensi/Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
- Umur Harapan Hidup saat Lahir(UHH SPLF 2020)	Tahun	75,06	75,36	75,63	76,08
Pengetahuan					
- Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,95	14,97	15,22	15,23
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,77	10,78	10,91	10,94
Standar Hidup Layak					
- Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.808	15.311	15.710	16.366
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		81,37	81,88	82,67	83,35

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data indikator makro Kabupaten Sidoarjo tahun 2022–2025, capaian pembangunan manusia menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami kenaikan bertahap dari 75,06 tahun pada 2022 menjadi 76,08 tahun pada 2025. Hal ini mencerminkan



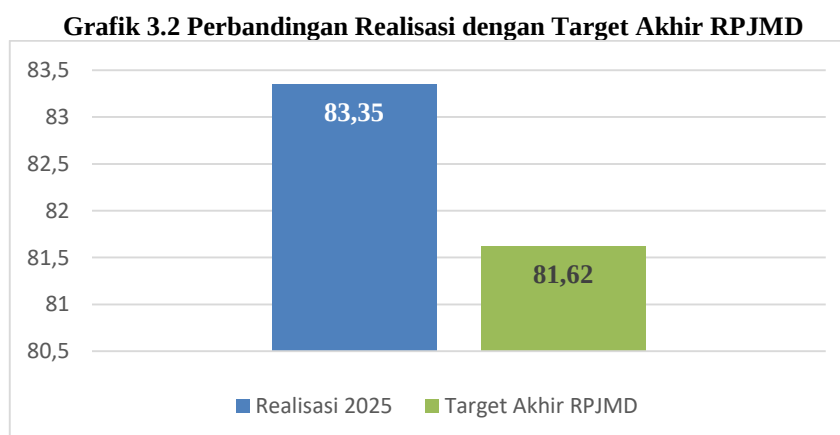


adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat serta meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan.

Pada dimensi pengetahuan, baik Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan peningkatan. HLS naik dari 14,95 tahun pada 2022 menjadi 15,23 tahun pada 2025, sementara RLS meningkat dari 10,77 tahun menjadi 10,94 tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita mengalami kenaikan signifikan dari Rp14.808 ribu pada 2022 menjadi Rp16.366 ribu pada 2025. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo juga meningkat dari 81,37 menjadi 83,35. Kenaikan IPM ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo semakin membaik, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 tercatat sebesar **83,35**, yang menunjukkan capaian pembangunan manusia berada pada kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **81,62**, maka capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD, yang menandakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara konsisten, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun daya beli masyarakat.



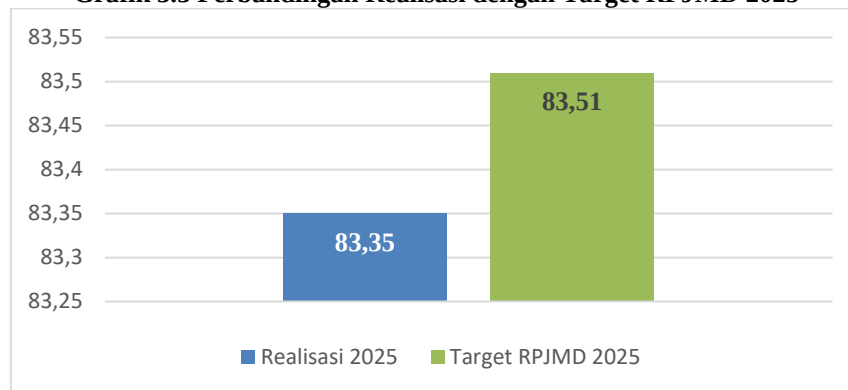
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo





Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target tahunan RPJMD Tahun 2025 sebesar **83,51**, capaian IPM Kabupaten Sidoarjo masih **belum mampu melampaui target** tersebut. Selisih capaian yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan manusia sudah berada pada jalur yang tepat (on track), namun masih diperlukan penguatan dan percepatan pada beberapa indikator penyusun IPM agar dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD 2025



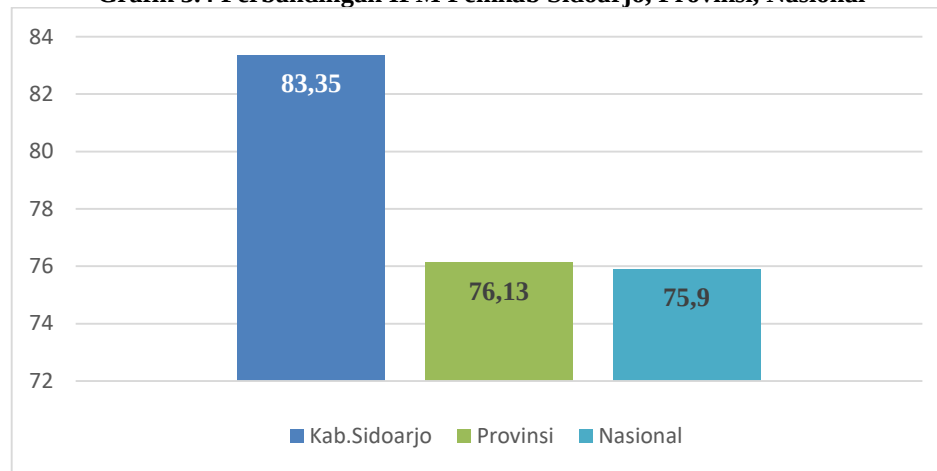
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan capaian IPM di tingkat provinsi dan nasional, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kinerja yang sangat baik. IPM Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 telah melampaui IPM Provinsi Jawa Timur sebesar **76,13** dan juga IPM Nasional sebesar **75,90**. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sidoarjo berada di atas rata-rata regional maupun nasional, serta mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengelola pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.





Grafik 3.4 Perbandingan IPM Pemkab Sidoarjo, Provinsi, Nasional



Sumber Data : BPS Nasional

Adapun belum tercapainya target RPJMD Tahun 2025 secara penuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Ketimpangan akses dan kualitas layanan antar kelompok masyarakat**, terutama pada wilayah tertentu atau kelompok rentan, yang menyebabkan capaian indikator belum merata.
2. **Daya beli masyarakat yang belum tumbuh optimal**, dipengaruhi oleh tekanan ekonomi seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga berdampak pada komponen pengeluaran riil per kapita.
3. **Dampak dinamika ekonomi global dan nasional**, yang secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.
4. **Belum optimalnya integrasi program lintas sektor**, sehingga intervensi terhadap peningkatan IPM belum sepenuhnya sinergis dan terfokus pada kelompok sasaran prioritas.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan strategi yang lebih terarah dan terintegrasi ke depan, seperti peningkatan kualitas dan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan yang inklusif, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan IPM sehingga tidak hanya mencapai, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan pada periode pembangunan berikutnya.





3.1.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Pada level kabupaten/kota se-Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo berada pada urutan ke-5 terendah dari 38 Kab/Kota. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa meskipun bersaing dengan daerah perkotaan yang secara karakteristik memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, Kabupaten Sidoarjo tetap mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Tabel 3.16 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025

No	Nama Kab/Kota	Presentase
1.	Kota Batu	2,86
2.	Kota Surabaya	3,56
3.	Kota Malang	3,85
4.	Kota Madiun	3,89
5.	Sidoarjo	4,4
6.	Kota Mojokerto	5,05
7.	Kota Probolinggo	5,69
8.	Tulungagung	5,96
9.	Kota Kediri	6,04
10.	Banyuwangi	6,13
11.	Kota Pasuruan	6,18
12.	Kota Blitar	6,6
13.	Blitar	7,57
14.	Pasuruan	8,21
15.	Jombang	8,36
16.	Lumajang	8,6



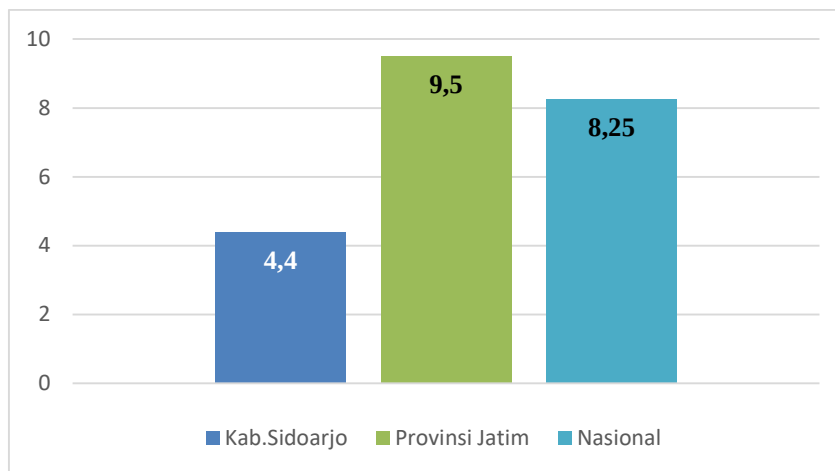


17. Jember	8,67
18. Malang	8,78
19. Mojokerto	8,79
20. Ponorogo	8,86
21. Magetan	9,14
22. Kediri	9,81
23. Gresik	9,95
24. Nganjuk	10,06
25. Trenggalek	10,29
26. Madiun	10,4
27. Situbondo	11,17
28. Bojonegoro	11,49
29. Lamongan	12,03
30. Bondowoso	12,2
31. Pamekasan	12,77
32. Pacitan	12,97
33. Ngawi	13,62
34. Tuban	14,13
35. Probolinggo	16,31
36. Sumenep	17,02
37. Bangkalan	18,25
38. Sampang	20,61

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur

Sedangkan apabila dibandingkan dengan presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur sebesar 9,5 persen dan presentase penduduk miskin Nasional sebesar 8,25 persen.

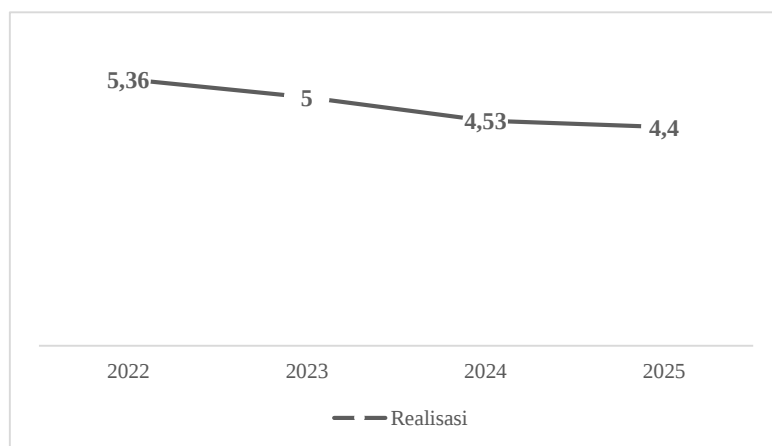
Grafik 3.5 Perbandingan Kab.Sidoarjo, Provinsi, Nasional



Sumber Data : BPS Nasional

Secara agregat, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari **4,53** persen pada tahun 2024 menjadi **4,40** persen pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan, baik melalui peningkatan akses terhadap lapangan kerja, bantuan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Grafik 3.6 Tren Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo

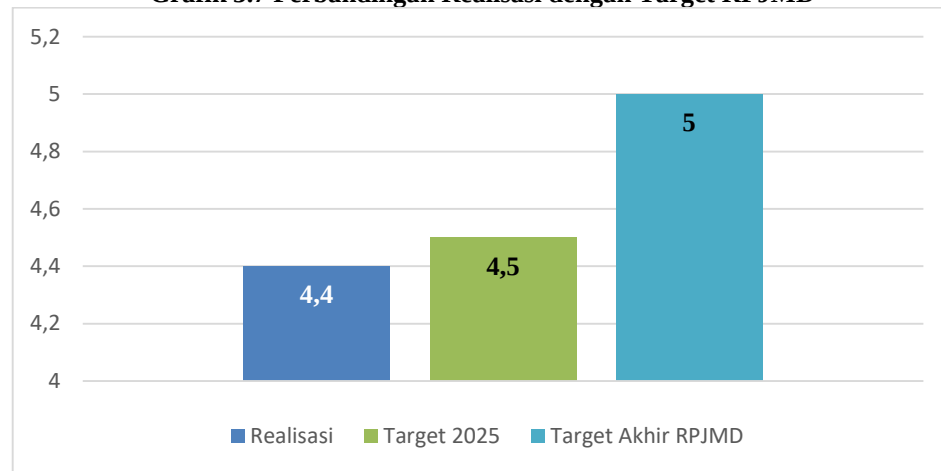


Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yang sebesar 4,54 persen, maka capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 **telah melampaui** target yang ditetapkan. Begitu juga dengan perbandingan dengan target akhir RPJMD sebesar 5 persen, sehingga kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dapat dinilai berhasil.



Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Meskipun secara umum persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan penurunan dan bahkan melampaui realisasi provinsi dan nasional, dalam konteks evaluasi kinerja tetap terdapat beberapa faktor ketidaktercapaian yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat

Meskipun Indeks Gini relatif rendah, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan dampak pertumbuhan ekonomi, terutama pada kelompok rentan dan pekerja sektor informal.

2. Dinamika harga dan inflasi

Kenaikan harga kebutuhan pokok serta tekanan inflasi berdampak pada daya beli masyarakat berpendapatan rendah, sehingga sebagian kelompok masih berada di sekitar garis kemiskinan (rentan miskin).

3. Pekerjaan informal yang dominan

Sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, sehingga mudah kembali jatuh ke dalam kemiskinan ketika terjadi guncangan ekonomi.





4. Ketidaktepatan sasaran program bantuan

Meskipun sudah semakin baik, masih terdapat potensi inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga belum seluruh masyarakat miskin menerima intervensi secara optimal.

5. Keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi

Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap lapangan kerja, permodalan, maupun pelatihan keterampilan, khususnya di wilayah atau kelompok tertentu.

6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada sebagian kelompok

Tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih terbatas menyebabkan sebagian masyarakat sulit bersaing di pasar kerja, terutama pada sektor formal.

7. Dampak eksternal ekonomi global dan nasional

Perlambatan ekonomi, perubahan struktur industri, serta ketidakpastian global dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan masyarakat.

8. Belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan

Koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan masih perlu diperkuat agar intervensi lebih terfokus, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif, sehingga upaya penurunan kemiskinan ke depan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu menekan kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun

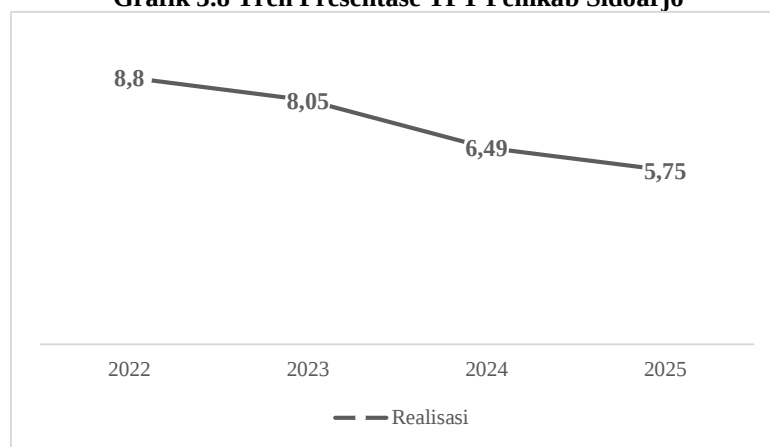




mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 tercatat sebesar **5,75** persen, mengalami penurunan sebesar 0,74 poin dibandingkan tahun 2024 yang masih berada pada angka **6,49** persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang cukup signifikan.

Grafik 3.8 Tren Presentase TPT Pemkab Sidoarjo



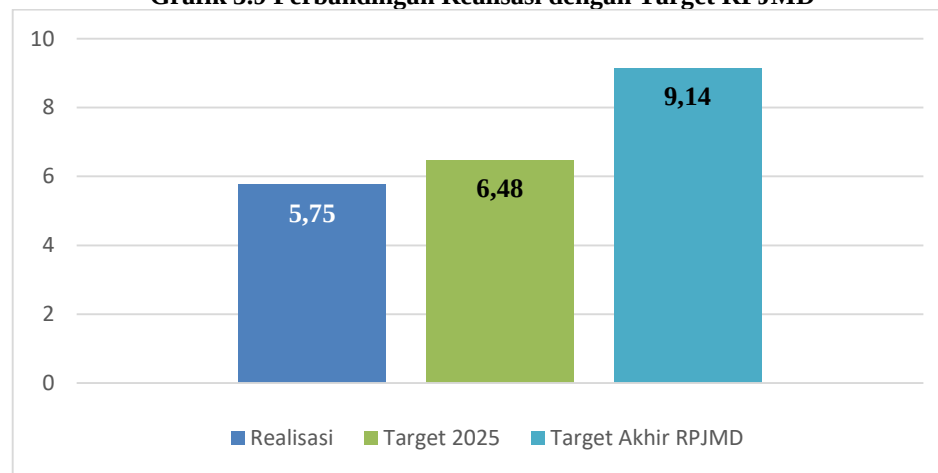
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 juga tergolong rendah, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar **6,48** persen, dan target akhir RPJMD sebesar **9,14** persen, maka capaian tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan, sehingga kinerja penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo dapat dinilai sangat baik.





Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari sisi struktur ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 mencapai **1.209,70 ribu** orang, meningkat sebanyak **37,14 ribu** orang dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar **1.172,56 ribu** orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan menjadi **69,53 persen**, naik 1,16 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 tercatat sebanyak **1.140,15 ribu** orang, atau meningkat **43,66 ribu** orang dibandingkan Agustus 2024. Dari sisi sektoral, sektor manufaktur menjadi penyumbang peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi dengan tambahan sebesar **45,57 ribu** orang, diikuti oleh sektor pertanian yang meningkat sebesar **30,39 ribu** orang. Namun demikian, sektor jasa mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar **32,31 ribu** orang, yang menjadi salah satu catatan penting dalam dinamika ketenagakerjaan daerah.

Dilihat dari status pekerjaan, sebanyak **710 ribu** orang (**62,27 persen**) bekerja pada sektor formal, meskipun mengalami penurunan sebesar 2,35 persen dibandingkan Agustus 2024. Sementara itu, TPT berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki TPT tertinggi sebesar **8,37 persen**, diikuti oleh lulusan SMA. Di sisi lain, lulusan SMP serta pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas)

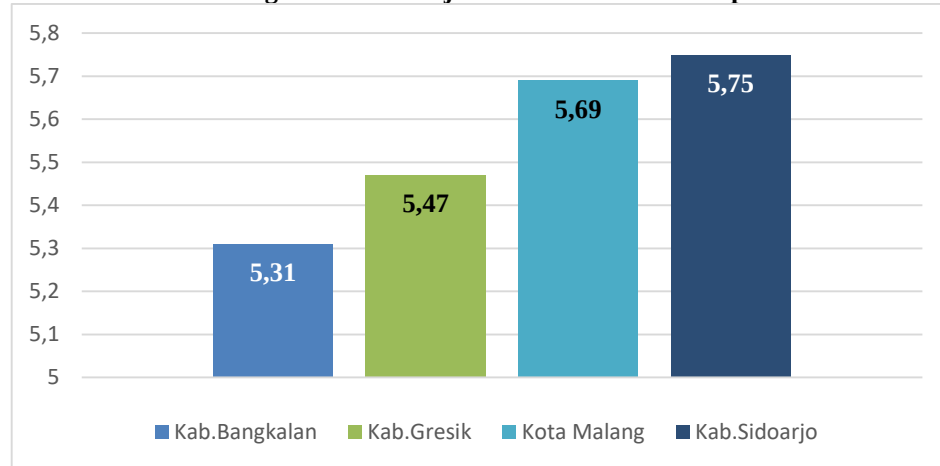




justru mengalami penurunan tingkat pengangguran, yang mengindikasikan adanya perbaikan daya serap tenaga kerja pada kelompok tersebut.

Sidoarjo merupakan Kabupaten dengan presentase TPT tertinggi di provinsi Jawa Timur, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya. Diantaranya adalah Kota Malang sebesar 5,69 persen, Kabupaten Gresik sebesar 5,47 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 5,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian TPT Kabupaten Sidoarjo sudah mengalami penurunan dan melampaui target, masih terdapat ruang perbaikan agar dapat lebih kompetitif dibandingkan daerah lain dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Grafik 3.10 Perbandingan Kab.Sidoarjo dan Kab/Kota Sekitar per November 2025



Sumber Data : BPS Nasional

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan dan telah melampaui target, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penurunan TPT secara berkelanjutan, antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri (*mismatch*)

Tingginya TPT pada lulusan SMK dan SMA menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada sektor industri yang terus berkembang dan membutuhkan keterampilan spesifik.

2. Dominasi sektor tertentu dalam penyerapan tenaga kerja





Penyerapan tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor manufaktur, sementara sektor lain seperti jasa justru mengalami penurunan. Ketergantungan ini menyebabkan terbatasnya alternatif lapangan kerja ketika sektor tertentu mengalami perlambatan.

3. Penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor jasa

Berkurangnya tenaga kerja di sektor jasa sebesar 32,31 ribu orang menjadi indikasi adanya perlambatan atau perubahan struktur ekonomi, yang berdampak pada meningkatnya potensi pengangguran di sektor tersebut.

4. Proporsi pekerjaan formal yang belum meningkat signifikan

Meskipun jumlah pekerja formal cukup besar, persentasenya justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja masih terserap pada sektor informal yang cenderung kurang stabil dan rentan terhadap kehilangan pekerjaan.

5. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja

Peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahun tidak selalu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang memadai, sehingga berpotensi menambah jumlah pengangguran.

6. Terbatasnya akses informasi pasar kerja

Sebagian pencari kerja masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang sesuai, termasuk keterbatasan akses terhadap platform penempatan kerja dan bursa kerja.

7. Dampak dinamika ekonomi global dan nasional

Ketidakpastian ekonomi, perubahan tren industri, serta tekanan eksternal dapat mempengaruhi kinerja sektor usaha dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

8. Keterbatasan pelatihan berbasis kebutuhan industri

Program pelatihan kerja yang ada belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil pasar kerja (*demand-driven*), sehingga lulusan pelatihan belum optimal terserap di dunia kerja.





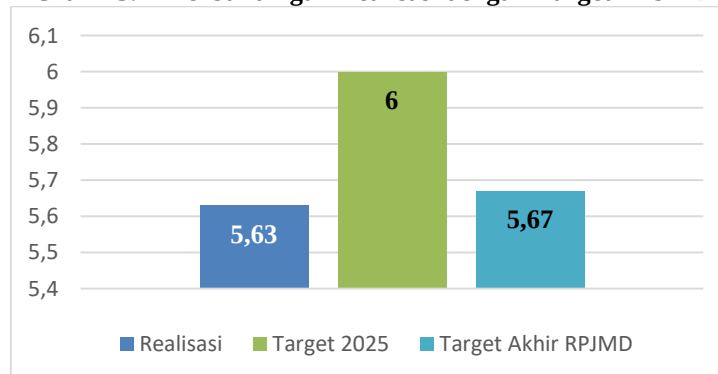
Dengan adanya berbagai faktor penghambat tersebut, diperlukan upaya yang lebih terarah seperti penguatan link and match pendidikan dan industri, diversifikasi lapangan kerja, peningkatan kualitas pelatihan vokasi, serta perluasan akses informasi pasar kerja guna mendorong penurunan TPT yang lebih optimal di masa mendatang.

3.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang tidak dapat dihitung secara parsial, karena memerlukan proses konsolidasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, verifikasi antar komponen sektoral, serta penyesuaian metodologis agar angka yang dihasilkan bersifat final, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu, data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi rujukan utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sidoarjo, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 tercatat sebesar **5,63** persen, atau mencapai 93,83 persen dari target yang telah ditetapkan. Meskipun **belum** sepenuhnya **mencapai target**, capaian ini tetap menunjukkan performa yang positif dan stabil.

Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD



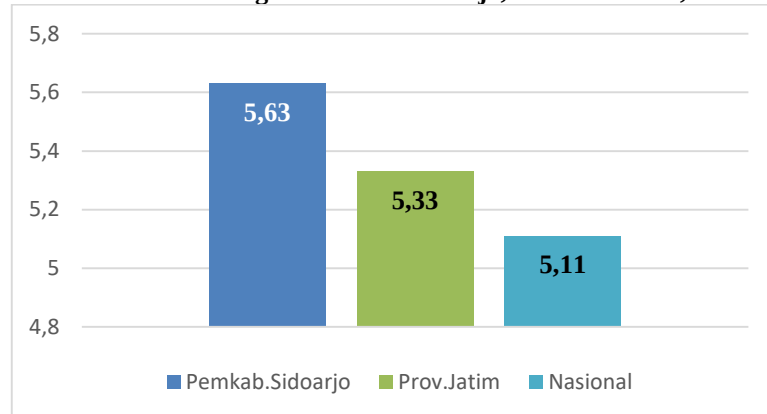
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Bahkan, jika dibandingkan dengan capaian di tingkat yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo berada di atas rata-rata nasional sebesar **5,11** persen dan juga melampaui Provinsi Jawa Timur sebesar **5,33** persen. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berkembang lebih dinamis dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.





Grafik 3.12 Perbandingan Pemkab.Sidoarjo, Provinsi Jatim, Nasional



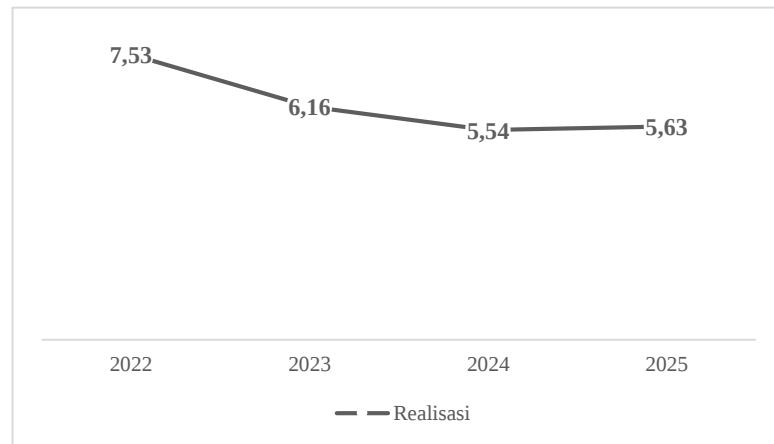
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari sisi komparatif regional, Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-10 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, yang berarti masuk dalam kelompok 25 persen daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Posisi ini menegaskan bahwa Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan kinerja ekonomi unggulan di Jawa Timur. Selain itu, dalam dua tahun terakhir, Sidoarjo secara konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, dengan selisih sekitar +0,30 poin persentase pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah memiliki daya dorong yang kuat dan relatif lebih resilien.

Jika ditinjau secara tren, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan **peningkatan** dari 5,54 persen pada tahun 2024 menjadi 5,63 persen pada tahun 2025, yang mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan cenderung menguat. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran sektor-sektor unggulan, terutama sektor industri pengolahan, perdagangan, serta jasa yang menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah. Selain itu, meningkatnya konsumsi masyarakat dan investasi juga turut memberikan kontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Grafik 3.13 Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo





Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Konteks Makro yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 :

Dalam membaca laju pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa kinerja PDRB tidak berdiri sendiri. Tahun 2025 berada dalam lanskap yang dipengaruhi faktor makro nasional, regional, dan internasional, yang umumnya memengaruhi daerah industri–perdagangan seperti Sidoarjo melalui jalur permintaan, biaya produksi, logistik, dan kepercayaan pelaku usaha. Faktor-faktor utama yang lazim menjadi pemicu fluktuasi pertumbuhan antara lain:

a. **Ketidakpastian ekonomi global dan perdagangan internasional**

Tekanan permintaan global, perubahan biaya logistik, serta dinamika rantai pasok dapat menahan ekspansi sektor manufaktur dan perdagangan, terutama pada subsektor yang terkait pasar ekspor maupun bahan baku impor.

b. **Perubahan harga komoditas dan biaya energi/transportasi**

Kenaikan atau volatilitas biaya input (energi, transportasi, bahan baku) berpengaruh langsung pada struktur biaya industri, margin usaha, dan keputusan ekspansi investasi.

c. **Kebijakan moneter dan biaya pembiayaan (*cost of fund*)**

Perubahan suku bunga dan likuiditas perbankan berdampak pada konsumsi, permintaan kredit, serta investasi sektor riil. Daerah dengan basis UMKM dan industri pengolahan sensitif terhadap dinamika pembiayaan.





d. Dinamika regional Jawa Timur

Arus barang, konektivitas pelabuhan/koridor logistik, serta kompetisi antar-kawasan industri di Jawa Timur turut memengaruhi pergerakan produksi, distribusi, dan investasi di Sidoarjo.

e. Perubahan struktur ekonomi domestik

Transisi dari pola pertumbuhan berbasis kuantitas menuju kualitas (produktivitas, efisiensi, nilai tambah) sering membuat pertumbuhan lebih “selektif”: sektor yang adaptif tumbuh lebih cepat, sementara sektor yang kurang produktif cenderung melambat.

Pemerintah Daerah tetap menyiapkan langkah mitigasi yang relevan dengan risiko- risiko makro tersebut. Mitigasi dan langkah penguatan yang dapat dilakukan daerah untuk menjaga ketahanan pertumbuhan dan memperkecil dampak tekanan eksternal, kebijakan daerah diarahkan pada penguatan mesin ekonomi yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, melalui:

1. Stabilisasi biaya dan kelancaran distribusi

Penguatan koordinasi pasokan–distribusi, pengurangan hambatan logistik lokal, dan dukungan kelancaran arus barang untuk menahan biaya ekonomi tinggi.

2. Penguatan industri bernilai tambah dan hilirisasi

Mendorong transformasi dari sekadar produksi menjadi nilai tambah (*processing, quality upgrading, standardisasi, packaging, cold chain* untuk pangan/perikanan, dan integrasi rantai pasok lokal) agar ekonomi lebih tahan terhadap fluktuasi harga input dan permintaan.

3. Perluasan pasar dan substitusi impor selektif

Memperkuat akses pasar antar-daerah dan *digital channel*, sekaligus mendorong penggunaan input lokal yang *feasible* untuk mengurangi kerentanan pada bahan baku tertentu.

4. Percepatan investasi yang berkualitas (bukan sekadar kuantitas)

Penyederhanaan perizinan berbasis risiko, kepastian lahan/*utility*, dan fasilitasi





penyelesaian kendala proyek agar investasi yang masuk cepat berproduksi (lebih cepat menjadi output PDRB).

5. Penguatan UMKM dan daya beli

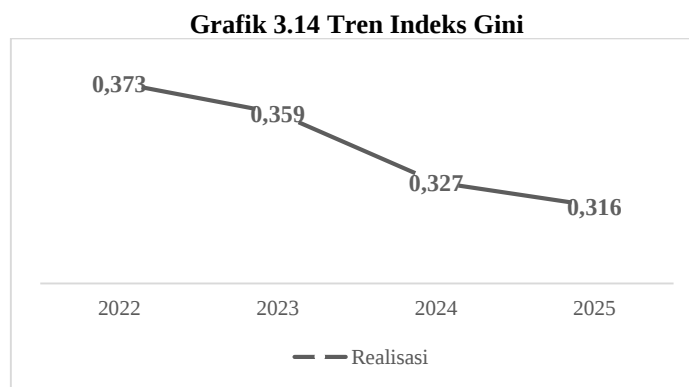
Penguatan produktivitas UMKM (kurasi produk, pembiayaan, pendampingan, digitalisasi) dan stabilisasi harga kebutuhan pokok untuk menjaga permintaan domestik sebagai bantalan (*shock absorber*) saat tekanan global meningkat.

6. Penguatan koordinasi data dan *early warning* ekonomi

Membangun pemantauan indikator cepat (produksi industri, mobilitas logistik, inflasi, penyerapan tenaga kerja) agar respons kebijakan lebih cepat dan terarah sebelum tekanan makro tercermin pada PDRB tahunan.

3.1.5. Rasio Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa. Berikut perkembangan Disparitas (Indeks Gini) di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok

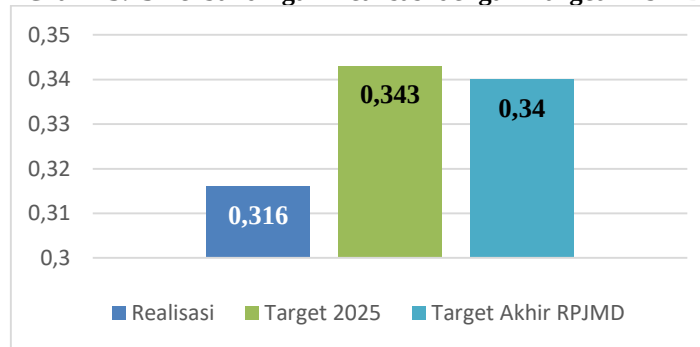




ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 tercatat sebesar 0,316, lebih rendah dari target tahun 2025 sebesar 0,343, sehingga capaian ini telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 0,340, maka capaian Tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang lebih baik dari target akhir, sekaligus menempatkan Kabupaten Sidoarjo pada kategori ketimpangan rendah. Hal ini mencerminkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata di masyarakat.

Grafik 3.15 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD



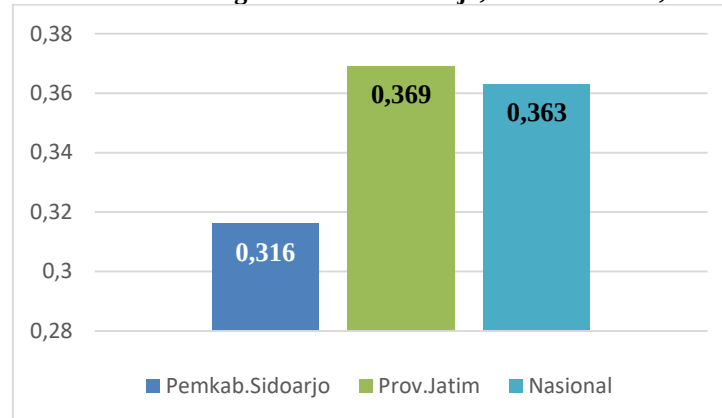
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,316, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan berada pada kategori rendah. Capaian ini mencerminkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Sidoarjo relatif merata dibandingkan dengan banyak daerah lainnya. Jika dibandingkan dengan tingkat yang lebih luas, kinerja Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil yang lebih baik. Indeks Gini Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar **0,369**, sedangkan Indeks Gini Nasional sebesar **0,363**. Dengan demikian, nilai Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo yang lebih rendah mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di daerah ini lebih kecil dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.





Grafik 3.16 Perbandingan Pemkab.Sidoarjo, Provinsi Jatim, Nasional



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan di Kabupaten Sidoarjo cenderung lebih inklusif, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan penurunan tingkat ketimpangan tersebut didukung oleh beberapa **faktor penunjang**, antara lain:

1. **Efektivitas program perlindungan sosial**, seperti bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mampu menekan kesenjangan pendapatan.
2. **Pertumbuhan ekonomi yang inklusif**, dimana peningkatan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk kelompok menengah ke bawah.
3. **Pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan**, yang memberikan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat di lapisan bawah.
4. **Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan**, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan ekonomi.





5. **Perluasan kesempatan kerja**, seiring dengan meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
6. **Perbaikan tata kelola distribusi bantuan dan data kesejahteraan**, sehingga intervensi kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada pengurangan kesenjangan.

Dengan adanya dukungan faktor-faktor tersebut, capaian Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam menekan ketimpangan, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan yang semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.1.6. Indeks Reformasi Birokrasi

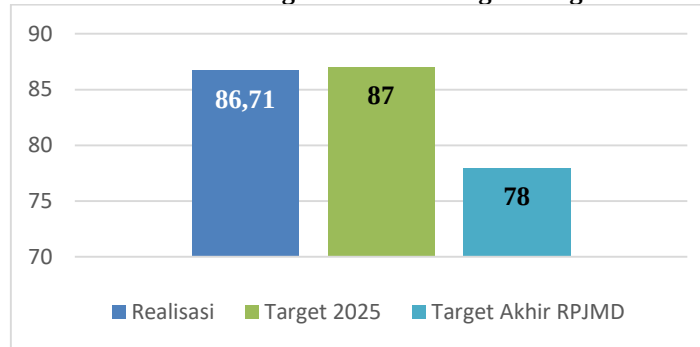
Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami perbaikan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo ditargetkan berada pada kategori A (Sangat Baik). Hasil penilaian menunjukkan Kabupaten Sidoarjo memperoleh predikat A (Sangat Baik) dengan nilai **sementara 86,71 (A)**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 87,00 maka **belum melampaui** target yang telah ditetapkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 78,00, maka nilai RB sudah melampaui target yang ditetapkan. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 ini belum final. Pada tanggal 27 Februari 2026 masih dalam proses pengajuan sanggah. Sehingga masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan nilai lebih tinggi dari 86,71.





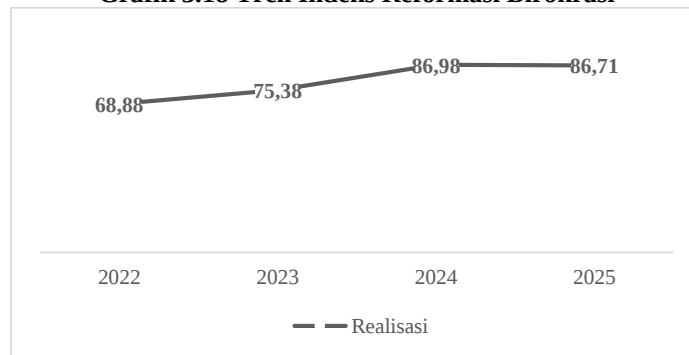
Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Secara kategori, capaian ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola telah berjalan kuat dan stabil. Adapun deviasi terhadap target angka yang ditetapkan pada dokumen perencanaan bersifat marginal dan perlu dibaca secara proporsional : perbedaan kecil pada skor total dapat terjadi karena RB merupakan agregasi dari banyak sub-indikator, dimana pergeseran pada sebagian kecil komponen (misalnya bukti dukung, pemenuhan standar, atau hasil verifikasi) dapat memengaruhi skor akhir tanpa mengubah kategori kinerja yang tetap berada pada level “Sangat Baik”. Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.18 Tren Indeks Reformasi Birokrasi



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Untuk memperkuat capaian pada periode berikutnya, langkah mitigasi diarahkan pada dua jalur yang terukur. Pada jalur substantif, fokus penguatan dilakukan pada konsistensi implementasi lintas perangkat daerah terhadap indikator RB yang paling sensitif terhadap penilaian (akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, SPBE,





integritas dan pengendalian internal, serta efektivitas tindak lanjut pengawasan dan pengaduan). Pada jalur tata kelola penilaian, penguatan dilakukan melalui pengendalian kualitas dokumen dan eviden: standardisasi bukti dukung, quality assurance internal sebelum submit, penguatan *clearing house* verifikasi OPD, serta penjadwalan pemenuhan eviden yang lebih awal agar tidak terjadi penurunan skor akibat ketidaklengkapan administrasi atau perbedaan interpretasi eviden saat verifikasi. Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, terdapat dua komposisi dalam pembentuknya. Pertama, penguatan tata kelola inti pemerintahan (RB General) telah menjadi fondasi yang kuat—menyangkut akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, layanan publik, SPBE, pengadaan, statistik sektoral, merit system, serta tindak lanjut pengaduan dan rekomendasi pengawasan. Kedua, kontribusi RB Tematik telah terbangun dan perlu terus ditingkatkan agar dampak reformasi birokrasi lebih terasa langsung pada outcome prioritas pembangunan (kemiskinan, investasi, inflasi, stunting, dan TKDN).

Beberapa faktor utama Pendukung Peningkatan Reformasi Birokrasi yang berkontribusi terhadap peningkatan skor reformasi birokrasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2. Implementasi sistem manajemen kinerja yang lebih transparan dan terukur.
3. Peningkatan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) berbasis indikator kinerja utama (IKU).
4. Optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital guna memastikan keterbukaan informasi publik.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6. Digitalisasi layanan publik melalui sistem pelayanan berbasis elektronik (*e-government*).





7. Penyederhanaan prosedur layanan administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
8. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah.
9. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Internal
10. Penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
11. Peningkatan peran Inspektorat dalam melakukan audit kinerja dan kepatuhan.
12. Implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan whistle blowing system untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
13. Pengembangan SDM Aparatur yang Profesional
14. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
15. Implementasi sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia.
16. Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.
17. Peningkatan Kinerja Organisasi dan Budaya Kerja
18. Pembentukan budaya kerja yang adaptif dan inovatif.
19. Penerapan sistem kerja berbasis kinerja yang lebih produktif.
20. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi.
21. Dampak dan Implikasi Peningkatan nilai reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta percepatan





pembangunan daerah. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Sidoarjo semakin dekat menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

22. Keberhasilan dalam peningkatan skor reformasi birokrasi tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
23. Memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.
24. Melanjutkan inovasi dalam layanan publik berbasis teknologi digital.
25. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah.
26. Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
27. Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat terus meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

3.1.7. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran dimaksud meliputi dimensi pengukuran sebagai berikut :

1. Jalan kondisi mantap, sedang dan baik
2. Saluran irigasi dan drainase baik
3. Sarana dasar permukiman baik

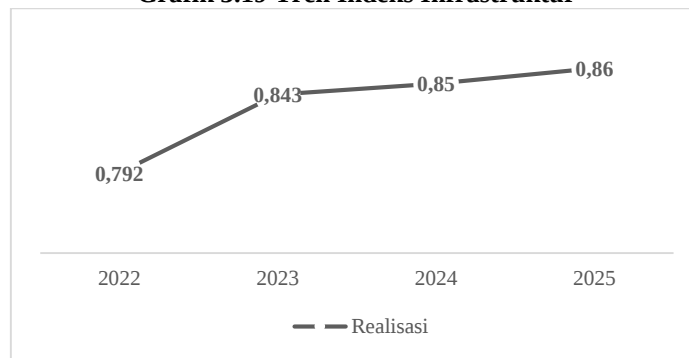




4. Sarpras perhubungan baik
5. Fasilitas pendidikan baik
6. Fasilitas kesehatan baik

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 mencapai **0,860** dari target 0,858 sehingga mencapai target dengan capaian **100,23%**. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 0,850, maka mengalami kenaikan sebesar 0,01 atau 1,18%. Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik 3.19 Tren Indeks Infrastruktur

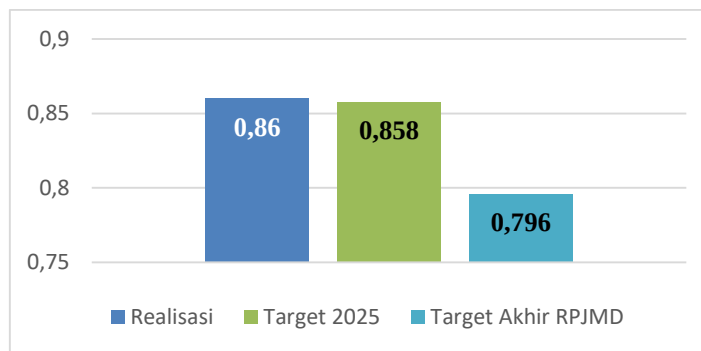


Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2025 sebesar **0,858**, capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo telah melampaui target yang ditetapkan. Bahkan, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang sebesar **0,796**, capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang jauh lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mengalami percepatan yang signifikan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

Grafik 3.20 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD





Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Namun demikian, untuk indikator Indeks Infrastruktur ini **tidak tersedia data pembandingan secara langsung pada level provinsi maupun nasional**, sehingga analisis kinerja lebih difokuskan pada perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) serta capaian tahun sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi keberhasilan lebih menitikberatkan pada konsistensi peningkatan dan pencapaian target internal daerah.

Adapun keberhasilan capaian Indeks Infrastruktur yang mampu melampaui target RPJMD didukung oleh beberapa **faktor penunjang**, antara lain:

1. **Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berbasis kebutuhan**, sehingga program yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
2. **Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur**, baik melalui APBD maupun dukungan sumber pendanaan lainnya, yang memungkinkan percepatan pembangunan.
3. **Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah**, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur lebih terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial.
4. **Optimalisasi pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur eksisting**, tidak hanya pembangunan baru, sehingga kualitas layanan tetap terjaga.
5. **Dukungan investasi dan partisipasi sektor swasta**, terutama dalam pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi.
6. **Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan.**

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten



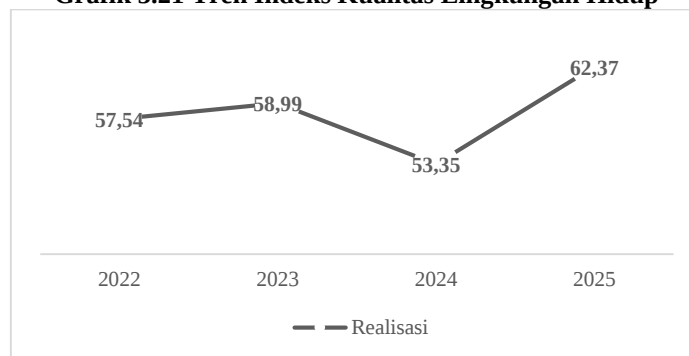
Sidoarjo tidak hanya berhasil melampaui target, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang semakin maju, efektif, dan berkelanjutan.

3.1.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang memberikan gambaran ringkas mengenai kondisi lingkungan hidup suatu daerah dalam periode tertentu. IKLH dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Dengan sifatnya yang komposit, capaian IKLH sangat dipengaruhi oleh dinamika masing-masing komponen penyusunnya.

Pada Tahun 2025, IKLH Kabupaten Sidoarjo mencapai **62,37** dari target RPJMD sebesar 65,08, sehingga secara kategori berada pada level sedang. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 53,35, atau naik **9,02** poin. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa secara umum terdapat perbaikan kualitas lingkungan hidup yang cukup berarti dalam satu tahun terakhir. Adapun perkembangan nilai/skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.21 Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

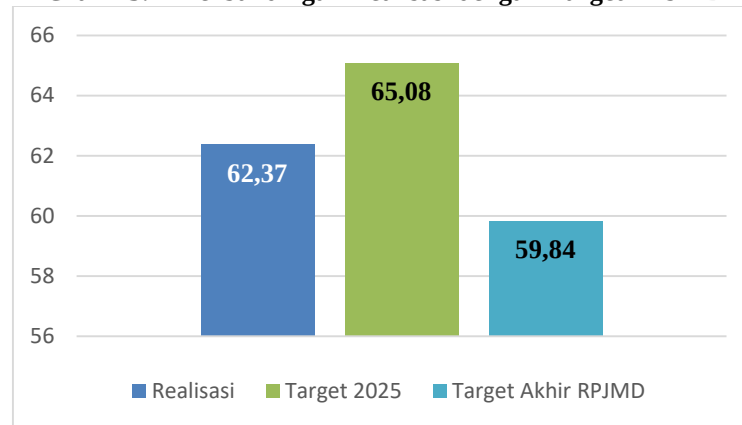
Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2025 sebesar 65,08, capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo memang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 59,84, capaian tahun 2025 sudah melampaui target akhir tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan belum tercapai, arah pembangunan lingkungan hidup





di Kabupaten Sidoarjo telah berada pada jalur yang positif dan melampaui ekspektasi jangka menengah. Capaian ini juga mencerminkan adanya percepatan perbaikan kualitas lingkungan yang cukup signifikan dalam periode RPJMD.

Grafik 3.22 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD

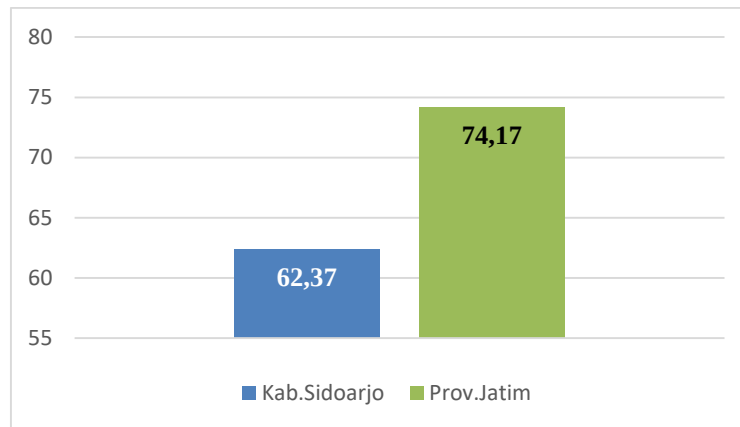


Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH di tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian Kabupaten Sidoarjo masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 74,17. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan signifikan, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar dapat sejajar atau melampaui capaian provinsi. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Sidoarjo yang didominasi kawasan industri dan permukiman padat, sehingga tekanan terhadap lingkungan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

Grafik 3.23 Perbandingan Kab.Sidoarjo dan Prov.Jatim





Sumber Data : LKPJ Provinsi Jawa Timur

Adapun belum tercapainya target RPJMD Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. **Tingginya tekanan aktivitas industri dan urbanisasi**, yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan air, serta meningkatnya volume limbah.
2. **Pengelolaan limbah yang belum optimal**, baik limbah domestik maupun industri, sehingga masih terdapat pencemaran di beberapa wilayah.
3. **Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan**, yang berdampak pada rendahnya daya dukung lingkungan.
4. **Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya ramah lingkungan**, seperti pengelolaan sampah yang belum optimal dan rendahnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan.
5. **Keterbatasan anggaran dan sumber daya**, yang mempengaruhi cakupan dan kualitas program pengelolaan lingkungan hidup.
6. **Koordinasi lintas sektor yang belum optimal**, sehingga pelaksanaan program lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dan efektif.
7. **Penegakan hukum lingkungan yang masih perlu diperkuat**, terutama dalam mengendalikan pelanggaran terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dengan memahami faktor penghambat tersebut, diharapkan ke depan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi, sehingga



peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan pula upaya yang lebih terarah dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti:

1. **Pengendalian pencemaran air dan udara**, melalui pengawasan ketat terhadap limbah industri dan domestik serta penerapan standar baku mutu lingkungan.
2. **Peningkatan pengelolaan sampah terpadu**, termasuk pengurangan sampah dari sumber, penguatan program daur ulang, dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R).
3. **Perluasan dan revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH)**, guna meningkatkan kualitas udara dan keseimbangan ekosistem perkotaan.
4. **Rehabilitasi lingkungan dan konservasi sumber daya alam**, terutama pada wilayah yang mengalami degradasi lingkungan.
5. **Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha**, melalui edukasi lingkungan serta penerapan praktik ramah lingkungan di berbagai sektor.
6. **Penguatan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan**, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran.
7. **Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan**, seperti pengolahan limbah berbasis teknologi dan penggunaan energi bersih.

3.1.9. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

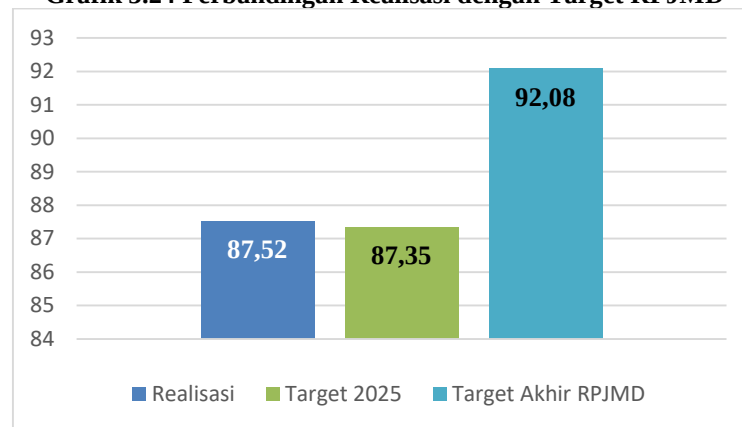
Capaian Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2025 meningkat dari Tahun 2024 yaitu sebesar 87,52 yaitu 0,19 poin atau sekitar 0,22%. Apabila diperbandingkan dengan target Tahun 2025 yaitu 87,35 maka tercapai 100,19% atau sudah melampaui target





yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 92,08, capaian saat ini masih berada di bawah target jangka menengah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja sudah sangat baik dan berada pada tren positif, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan nilai Indeks Kesalehan Sosial agar dapat mencapai target akhir yang telah direncanakan.

Grafik 3.24 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD

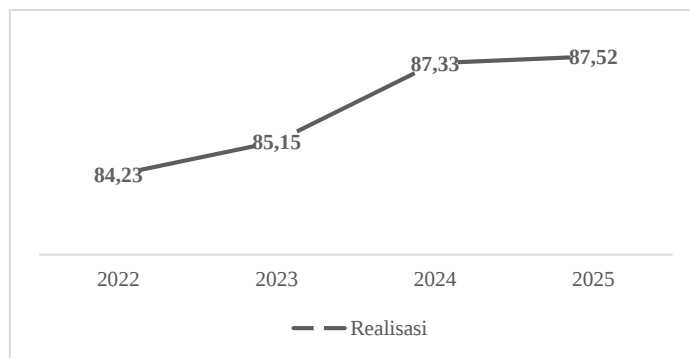


Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Jika dilihat dari tren selama beberapa tahun terakhir, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada Tahun 2022 sebesar **84,23**, meningkat menjadi **85,15** pada Tahun 2023, kemudian naik cukup signifikan menjadi **87,33** pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi **87,52** pada Tahun 2025. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam nilai-nilai sosial masyarakat, seperti kepedulian sosial, toleransi, dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Grafik 3.25 Tren Indeks Kesalehan Sosial

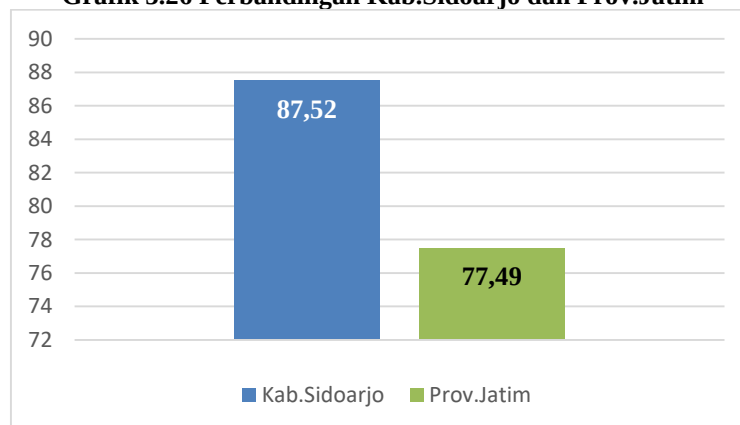




Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Selain itu, jika dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 yang sebesar 87,52 berada jauh diatas Indeks Kesalehan Sosial Provinsi sebesar 77,49. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sidoarjo relatif lebih baik dalam hal nilai-nilai kesalehan sosial, serta mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan sosial yang telah dilaksanakan di daerah.

Grafik 3.26 Perbandingan Kab.Sidoarjo dan Prov.Jatim



Sumber Data : LKPJ Provinsi Jawa Timur

Keberhasilan peningkatan Indeks Kesalehan Sosial tersebut didukung oleh beberapa faktor penunjang, antara lain:

1. **Penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di masyarakat**, melalui kegiatan keagamaan, pendidikan karakter, dan pembinaan sosial yang berkelanjutan.
2. **Peran aktif lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat**, dalam membangun solidaritas sosial, kepedulian, serta toleransi antar warga.



3. **Program pemerintah daerah yang berorientasi pada pembangunan sosial**, seperti pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, dan penguatan ketahanan sosial.
4. **Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan**, termasuk gotong royong, kegiatan amal, dan kepedulian terhadap sesama.
5. **Kondisi sosial yang relatif kondusif dan harmonis**, yang mendukung terciptanya interaksi sosial yang positif dan inklusif.
6. **Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha**, dalam mendukung kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, peningkatan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mencerminkan capaian angka, tetapi juga menunjukkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang semakin baik dan berkelanjutan.

3.2. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran

3.2.1. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dalam mengadaptasi ketentuan terkait, pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat kementerian / lembaga (K/L) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian negaran/ lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut di peroleh dari formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian kinerja}) - \text{realisasi anggaran}}{\text{Pagu anggaran} \times \text{capaian kinerja}} \times 100$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja. Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah :





Tabel 3.17 Tabel Realisasi Anggaran Per Indikator

INDIKATOR	kinerja			anggaran			tingkat efisiensi
	target	realisasi	% kinerja	target	realisasi	% anggaran	$\frac{(a*b)-c}{(a*b)*100}$ %
				b	c		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,51	83,35	100,79%	6.066.749.190.287,20	4.468.276.926.648,44	73,65%	27%
Tingkat Kemiskinan	4,52	4,4					
Pertumbuhan Ekonomi	6	5,63					
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,48	5,75					
Rasio Gini	0,326	0,316					
Indeks Reformasi Birokrasi	87	86,71					
Indeks Infrastruktur	0,858	0,86					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,08	62,37					
Indeks Kesalehan Sosial	87,35	87,52					

Terkait pagu anggaran pada sasaran satu yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap – tiap indicator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja rata-rata sasaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 3. 27 Rumus Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{n=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indicator kemudian di akar pangkatkan dengan banyaknya jumlah indicator tersebut. Sehingga berdasarkan





tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah :

Tabel 3.18 Tabel Realisasi Anggaran Per program

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI(Rp.)	CAPAIAN (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.539.004.120.021,00	1.457.891.835.829,00	94,73%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	883.598.442.774,00	843.138.630.427,00	95,42%
	Program Pengelolaan Pendidikan	655.399.077.247,00	612.668.036.432,00	93,48%
	Program Pengendalian Perijinan	6.600.000,00	4.490.000,00	68,03%
	Program Pengembangan Kebudayaan	2.154.807.085,00	2.080.678.970,00	96,56%
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	600.000,00	0,00	0,00%
2	DINAS KESEHATAN	605.689.216.043,00	676.366.127.356,00	111,67%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	359.172.294.059,00	438.893.364.674,00	122,20%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	224.929.130.260,00	216.115.052.676,00	96,08%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.595.079.624,00	3.149.348.285,00	87,60%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	600.391.700,00	589.936.156,00	98,26%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	17.392.320.400,00	17.618.425.565,00	101,30%
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	395.025.799.951,00	282.614.868.770,00	71,54%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.428.115.540,00	17.128.215.049,00	83,85%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	24.733.315.012,00	22.556.785.375,00	91,20%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	79.441.745.820,00	63.886.625.009,00	80,42%
	Program Penyelenggaraan Jalan	270.422.623.579,00	179.043.243.337,00	66,21%





4	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	134.296.377.091,00	107.772.716.048,00	80,25%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.075.880.780,00	15.921.365.714,00	79,31%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.197.233.215,00	7.647.512.962,00	62,70%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	35.265.949.813,00	30.557.073.984,00	86,65%
	Program Penataan Bangunan Gedung	20.918.655.581,00	17.695.386.840,00	84,59%
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	300.000.000,00	280.846.196,00	93,62%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.398.789.107,00	3.220.205.719,00	94,75%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150.000.000,00	113.045.000,00	75,36%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.355.438.864,00	10.951.313.856,00	82,00%
	Program Pengembangan Perumahan	7.344.005.588,00	6.515.402.722,00	88,72%
	Program Kawasan Permukiman	52.500,00	0,00	0,00%
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.932.017.500,00	6.529.003.400,00	94,19%
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.333.693.937,00	8.331.059.655,00	80,62%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.800.000,00	10.500.000,00	97,22%
	Pogram Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	900.000,00	0,00	0,00%
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.736.349.819,00	29.778.261.494,00	88,27%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.948.482.605,00	17.450.090.885,00	87,48%
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	13.787.867.214,00	12.328.170.609,00	89,41%
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31.573.801.459,00	28.442.103.359,00	90,08%





	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.508.709.415,00	13.521.086.053,00	87,18%
	Program Penanggulangan Bencana	2.819.022.705,00	2.092.738.868,00	74,24%
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	13.246.069.339,00	12.828.278.438,00	96,85%
7	DINAS SOSIAL	47.516.576.003,00	42.403.127.963,00	89,24%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.305.971.674,00	6.325.019.943,00	76,15%
	Program Pemberdayaan Sosial	4.160.315.780,00	3.777.866.920,00	90,81%
	Program Rehabilitasi Sosial	10.864.391.224,00	10.220.451.407,00	94,07%
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.455.304.505,00	21.518.858.173,00	91,74%
	Program Penanganan Bencana	730.592.820,00	560.931.520,00	76,78%
8	DINAS TENAGA KERJA	24.284.301.474,00	22.752.688.381,00	93,69%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.846.347.025,00	8.970.647.588,00	91,11%
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	93.366.350,00	84.295.402,00	90,28%
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.512.558.844,00	7.346.998.515,00	97,80%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.123.172.332,00	1.045.655.847,00	93,10%
	Program Hubungan Industrial	5.708.856.923,00	5.300.091.029,00	92,84%
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10.450.000,00	5.000.000,00	47,85%
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	49.672.544.448,00	45.131.391.059,00	90,86%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.668.602.703,00	7.153.718.654,00	73,99%
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.877.085.927,00	1.754.386.260,00	93,46%
	Program Perlindungan Perempuan	4.152.504.472,00	4.144.177.794,00	99,80%
	Program Pemenuhan Hak Anak	537.545.000,00	455.919.702,00	84,82%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	25.060.920.450,00	24.375.181.334,00	97,26%





	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3.686.855.550,00	3.414.821.886,00	92,62%
	Program Pengendalian Kependudukan	4.129.930.346,00	3.833.185.429,00	92,81%
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	48.400.837.409,00	43.656.036.280,00	90,20%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.440.465.339,00	27.440.483.593,00	93,21%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	13.087.500,00	12.964.500,00	99,06%
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.444.982.500,00	1.368.335.910,00	94,70%
	Program Penangan Kerawanan Pangan	509.306.565,00	467.245.200,00	91,74%
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	607.701.240,00	581.668.406,00	95,72%
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.259.407.121,00	8.413.049.286,00	90,86%
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.391.713.563,00	1.299.651.134,00	93,38%
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.188.670.456,00	3.815.492.198,00	91,09%
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	295.505.297,00	253.164.803,00	85,67%
	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.000.000,00	3.981.250,00	99,53%
	Program Penyuluhan Pertanian	1.246.098.328,00	1.193.299.627,00	95,76%
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	128.242.546.363,00	110.618.218.140,00	86,26%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.872.593.676,00	31.680.970.594,00	90,85%
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.566.114.429,00	2.335.456.221,00	91,01%





	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	80.321.472.827,00	67.152.156.386,00	83,60%
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	328.321.190,00	290.883.490,00	88,60%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	101.526.400,00	84.777.336,00	83,50%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	236.649.570,00	217.382.502,00	91,86%
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00%
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	508.053.443,00	352.851.068,00	69,45%
	Program Pengelolaan Persampahan	9.305.189.828,00	8.501.115.543,00	91,36%
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	19.812.326.838,00	17.862.619.679,00	90,16%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.875.522.588,00	16.088.182.372,00	90,00%
	Program Pendaftaran Penduduk	414.841.270,00	363.595.555,00	87,65%
	Program Pencatatan Sipil	588.168.121,00	534.286.612,00	90,84%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	876.069.859,00	819.303.464,00	93,52%
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	57.725.000,00	57.251.676,00	99,18%
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83.234.197.655,00	82.043.564.477,00	98,57%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.005.180.425,00	6.109.959.412,00	87,22%
	Program Penataan Desa	3.751.667,00	3.296.600,00	87,87%
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	114.287.500,00	95.105.000,00	83,22%
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	11.173.152.185,00	11.736.793.314,00	105,04%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	64.937.825.878,00	64.098.410.151,00	98,71%





	Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			
14	DINAS PERHUBUNGAN	138.266.106.326,00	120.471.364.406,00	87,13%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.174.769.429,00	22.864.754.431,00	90,82%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	103.277.771.982,00	88.750.543.291,00	85,93%
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	9.774.815.890,00	8.833.141.684,00	90,37%
	Program Pengelolaan Pelayaran	38.749.025,00	22.925.000,00	59,16%
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45.673.179.742,00	42.016.552.586,00	91,99%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.339.587.541,00	12.851.396.909,00	83,78%
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	5.637.889.948,00	5.870.547.001,00	104,13%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	21.458.051.751,00	20.823.906.269,00	97,04%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	597.447.681,00	571.928.796,00	95,73%
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.011.761.230,00	1.898.773.611,00	94,38%
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	19.774.316.425,00	17.755.595.523,00	89,79%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.683.193.855,00	8.052.505.583,00	83,16%
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00%
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	5.092.500,00	5.092.500,00	100,00%
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	17.492.445,00	16.848.575,00	96,32%
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.926.076.830,00	1.861.906.470,00	96,67%
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.595.303.599,00	1.567.822.587,00	98,28%
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.637.926.014,00	3.407.843.458,00	93,68%
	Program Pengembangan UMKM	2.904.191.182,00	2.838.536.350,00	97,74%





17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.049.572.862,00	13.836.186.768,00	86,21%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.825.438.228,00	11.831.865.061,00	85,58%
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.089.793.934,00	1.049.744.196,00	96,33%
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	250.000.000,00	245.241.052,00	98,10%
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	322.000.000,00	312.400.000,00	97,02%
	Program Promosi Penanaman Modal	562.340.700,00	396.936.459,00	70,59%
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	87.150.995.403,00	74.803.080.130,00	85,83%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.318.786.183,00	9.631.132.597,00	85,09%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.939.213.350,00	7.278.836.939,00	91,68%
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000,00	1.487.339.484,00	99,16%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	59.347.259.370,00	49.776.443.569,00	83,87%
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.101.141.010,00	1.959.963.692,00	93,28%
	Program Pemasaran Pariwisata	4.582.729.450,00	4.369.647.622,00	95,35%
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	35.500.000,00	4.125.000,00	11,62%
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	326.366.040,00	295.591.227,00	90,57%
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.619.372.170,00	12.246.876.841,00	89,92%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.800.822.322,00	9.518.959.623,00	88,13%
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.848.403.448,00	1.790.686.220,00	96,88%
	Program Pengelolaan Arsip	955.721.840,00	923.320.350,00	96,61%





	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.625.000,00	4.550.000,00	98,38%
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4.899.780,00	4.762.011,00	97,19%
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	4.899.780,00	4.598.637,00	93,85%
20	DINAS PERIKANAN	30.672.966.877,00	27.914.486.300,00	91,01%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.314.892.343,00	7.060.261.491,00	84,91%
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	924.943.272,00	876.205.525,00	94,73%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	17.591.273.319,00	16.222.134.473,00	92,22%
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	133.880.800,00	131.712.510,00	98,38%
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.707.977.143,00	3.624.172.301,00	97,74%
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	59.443.813.143,00	55.304.914.413,00	93,04%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.706.315.966,00	27.388.536.870,00	95,41%
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.868.538.324,00	15.704.931.040,00	93,10%
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.087.275.000,00	1.015.256.500,00	93,38%
	Program Pengembangan Ekspor	3.822.868.706,00	3.650.147.395,00	95,48%
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	366.036.003,00	340.238.879,00	92,95%
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8.418.804.144,00	7.124.903.729,00	84,63%
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	83.450.000,00	80.900.000,00	96,94%
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	90.525.000,00	0,00	0,00%
22	SEKRETARIAT DAERAH	119.072.563.128,00		0,00%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.696.223.883,00	49.021.972.230,00	57,20%
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	29.608.728.715,00	25.672.638.280,00	86,71%
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.767.610.530,00	3.208.303.159,00	85,15%
23	SEKRETARIAT DPRD	95.785.539.249,00	81.755.044.506,00	85,35%





	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.121.280.171,00	56.826.947.586,00	91,48%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	33.664.259.078,00	24.928.096.920,00	74,05%
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.242.796.113,00	20.558.867.397,00	92,43%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.856.250.699,00	13.505.747.743,00	90,91%
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.379.800.924,00	1.289.619.684,00	93,46%
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.723.429.070,00	4.543.328.370,00	96,19%
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.280.550.420,00	1.220.171.600,00	95,28%
	Program Riset dan Inovasi Daerah	2.765.000,00	0,00	0,00%
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	817.443.359.349,20	772.258.178.276,00	94,47%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.377.927.325,20	18.804.113.948,00	87,96%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	792.003.345.012,00	750.224.740.279,00	94,72%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.062.087.012,00	3.229.324.049,00	79,50%
26	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	41.908.110.334,00	32.693.672.078,00	78,01%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.766.673.665,00	24.046.657.002,00	80,78%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.141.436.669,00	8.647.015.076,00	71,22%
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22.290.348.934,00	19.286.056.579,00	86,52%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.100.736.490,00	14.538.873.019,00	85,02%
	Program Kepegawaian Daerah	4.003.300.482,00	3.599.508.080,00	89,91%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.186.311.962,00	1.147.675.480,00	96,74%





28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	78.820.305.204,00	70.606.886.537,44	89,58%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.486.485.745,00	5.031.468.611,00	77,57%
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.229.141.000,00	2.983.394.025,00	92,39%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20.064.097.770,00	16.777.825.962,00	83,62%
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	46.444.850.689,00	44.661.202.896,44	96,16%
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	6.000.000,00	5.319.563,00	88,66%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.589.730.000,00	1.147.675.480,00	44,32%
29	INSPEKTORAT	28.309.841.480,00	24.809.274.415,00	87,63%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.191.339.810,00	21.803.132.143,00	90,13%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.118.501.670,00	3.006.142.272,00	72,99%
30	KECAMATAN SIDOARJO	22.135.064.867,00	18.049.843.227,00	81,54%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.508.491.139,00	17.614.497.591,00	81,90%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	455.563.728,00	284.449.886,00	62,44%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	5.250.000,00	35,00%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	149.110.000,00	145.645.750,00	97,68%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.900.000,00	0,00	0,00%
31	KECAMATAN CANDI	6.087.249.618,00	5.036.840.622,00	82,74%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.431.699.948,00	4.627.127.477,00	85,19%





	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	562.923.570,00	321.123.145,00	57,05%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.138.000,00	6.100.000,00	99,38%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.610.000,00	53.510.000,00	96,22%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.878.100,00	28.980.000,00	93,85%
32	KECAMATAN BUDURAN	7.874.484.580,00	6.637.463.473,00	84,29%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.099.791.230,00	6.127.350.475,00	86,30%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	720.580.850,00	458.737.998,00	63,66%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.937.500,00	10.880.000,00	91,14%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.375.000,00	25.150.000,00	99,11%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.800.000,00	15.345.000	91,34%
33	KECAMATAN WONOAYU	6.152.257.784,00	5.044.776.351,00	82,00%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.509.883.664,00	4.423.986.449,00	80,29%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	491.673.920,00	477.142.302,00	97,04%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	53.362.500,00	48.055.000,00	90,05%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	88.937.700,00	87.217.600,00	98,07%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000,00	8.375.000,00	99,70%
34	KECAMATAN KRIAN	10.839.820.066,00	9.587.724.998,00	88,45%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.023.429.410,00	9.074.128.955,00	90,53%





	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	555.471.667,00	285.489.490,00	51,40%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	108.165.513,00	103.831.900,00	95,99%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	124.584.226,00	98.091.825,00	78,74%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.169.250,00	26.182.828,00	92,95%
35	KECAMATAN PORONG	9.229.711.849,00	8.030.030.680,00	87,00%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.606.250.703,00	7.473.661.133,00	86,84%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	537.792.446,00	481.043.347,00	89,45%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.175.000,00	10.980.000,00	83,34%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.443.700,00	46.086.200,00	86,23%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.050.000,00	18.260.000,00	95,85%
36	KECAMATAN KREMBUNG	6.073.832.284,00	4.682.998.935,00	77,10%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.388.917.838,00	4.057.001.470,00	75,28%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	540.679.590,00	489.789.425,00	90,59%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	40.935.000,00	37.225.000,00	90,94%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.924.856,00	87.883.040,00	96,65%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.375.000,00	11.100.000,00	89,70%
37	KECAMATAN JABON	6.007.872.310,00	5.035.676.903,00	83,82%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.383.816.000,00	4.648.687.825,00	86,35%





	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	464.205.731,00	241.280.078,00	51,98%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	42.960.325,00	37.325.500,00	86,88%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	104.402.850,00	96.370.000,00	92,31%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.487.404,00	12.013.500,00	96,20%
38	KECAMATAN BALONGBENDO	6.658.998.943,00	5.817.078.335,00	87,36%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.040.997.943,00	5.325.245.025,00	88,15%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	487.445.000,00	366.395.350,00	75,17%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.500.000,00	8.750.000,00	92,11%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.056.000,00	116.687.960,00	96,39%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00%
39	KECAMATAN TARIK	6.273.345.209,00	5.175.019.276,00	82,49%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.473.162.970,00	4.686.996.776,00	85,64%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	450.008.750,00	175.507.500,00	39,00%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	175.860.250,00	153.219.000,00	87,13%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	164.763.239,00	150.226.000,00	91,18%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.550.000,00	9.070.000,00	94,97%
40	KECAMATAN TAMAN	16.748.653.462,00	14.124.848.590,00	84,33%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.967.096.638,00	13.445.949.958,00	84,21%





	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	619.991.074,00	521.678.632,00	84,14%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.875.000,00	30.875.000,00	100,00%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	128.065.750,00	123.720.000,00	96,61%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00%
41	KECAMATAN WARU	7.694.297.539,00	6.104.245.987,00	79,33%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.697.014.735,00	5.253.123.065,00	78,44%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	780.799.965,00	666.503.922,00	85,36%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.288.000,00	20.410.000,00	95,88%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.232.339,00	109.746.500,00	90,53%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.962.500,00	54.462.500,00	73,64%
42	KECAMATAN GEDANGAN	7.877.051.047,00	6.827.544.665,00	86,68%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.740.626.934,00	5.884.084.256,00	87,29%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	756.014.213,00	593.517.005,00	78,51%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	117.250.000,00	110.615.154,00	94,34%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.009.900,00	74.660.000,00	98,22%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	187.150.000,00	164.668.250,00	87,99%
43	KECAMATAN SEDATI	6.880.717.635,00	5.766.075.377,00	83,80%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.967.422.483,00	5.049.568.565,00	84,62%





	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	690.094.690,00	519.994.312,00	75,35%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	46.112.500,00	43.562.500,00	94,47%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	161.882.962,00	152.950.000,00	94,48%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.205.000,00	0,00	0,00%
44	KECAMATAN TANGGULANGIN	6.297.358.150,00	5.262.082.249,00	83,56%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.642.193.598,00	4.880.790.749,00	86,51%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	528.357.052,00	260.758.500,00	49,35%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.337.500,00	3.337.500,00	100,00%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.970.000,00	116.070.500,00	95,16%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	1.125.000,00	75,00%
45	KECAMATAN TULANGAN	6.656.957.364,00	5.828.752.399,00	87,56%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.797.473.452,00	5.014.645.924,00	86,50%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	536.076.928,00	512.890.475,00	95,67%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	32.825.000,00	31.025.000,00	94,52%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	242.206.984,00	222.866.000,00	92,01%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.375.000,00	47.325.000,00	97,83%
46	KECAMATAN PRAMBON	6.991.063.843,00	11.068.895.945,00	158,33%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.372.228.075,00	5.282.560.569,00	82,90%





	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	540.603.618,00	496.562.307,00	91,85%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.195.200,00	3.712.500,00	88,49%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.036.950,00	5.282.560.569,00	7880,07%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000,00	3.500.000,00	50,00%
47	KECAMATAN SUKODONO	7.796.293.141,00	6.546.433.046,00	83,97%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.005.915.670,00	5.908.456.881,00	84,34%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	477.115.571,00	365.868.515,00	76,68%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	182.290.000,00	145.645.750,00	79,90%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	113.721.900,00	109.511.900,00	96,30%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.250.000,00	16.950.000,00	98,26%
	TOTAL ANGGARAN	6.066.749.190.287,20	4.468.276.926.648,44	73,65%

Realisasi anggaran tahun 2025 pada 120 program/kegiatan tersebut diatas, rata-rata realisasi capaian anggaran adalah **73,65%** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah **100,79%**, artinya penggunaan anggaran telah memenuhi target kinerja lebih dari 100%. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tersebut telah terjadi efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran sebesar **27%** mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.





BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 9 Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 5 indikator telah tercapai dengan nilai capaian $\geq 100\%$, sementara 4 indikator lainnya belum mencapai target (di bawah 100%). Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian indikator tujuan tersebut masih berada dalam kategori Sangat Baik (di atas 90,01%), dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100,79%**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah secara umum telah berjalan efektif dan sesuai dengan arah perencanaan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dirata-rata capaian kinerja utama tersebut sebesar 100,91% atau dalam katagori Sangat Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 masuk dalam katagori Sangat Baik.

Namun demikian, perlu disampaikan bahwa untuk nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 hingga saat ini belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Oleh karena itu, nilai RB yang digunakan dalam laporan ini masih bersifat **sementara** (*tentative*) dan mengacu pada data yang tersedia pada portal resmi, yaitu portalrb.id. Nilai tersebut masih berpotensi mengalami perubahan setelah dilakukan proses verifikasi dan penetapan resmi oleh kementerian terkait. Dengan demikian, penyajian nilai Reformasi Birokrasi dalam laporan ini perlu dipahami sebagai data sementara yang akan disesuaikan kembali setelah hasil final diumumkan secara resmi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025, telah didukung dengan anggaran sebesar **Rp6.066.749.190.287,00**, dengan realisasi sebesar **Rp4.468.276.926.648,44** atau **73,65%**. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 120 program





kegiatan yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan.

4.2. Tindak Lanjut

Adapun dari indikator sasaran yang sudah tercapai dengan kategori Sangat Baik dan Baik akan di pertahankan dan ditingkatkan kedepannya, sedangkan pada pencapaian target kinerja dengan kategori kurang akan dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk peningkatan di tahun akan datang.

Berikut salah satu indikator tujuan yang masuk katagori Kurang, yaitu :

1. Indeks Pengembangan Manusia (IPM)

Upaya peningkatan IPM difokuskan pada penguatan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, dengan langkah-langkah:

- Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk percepatan penurunan stunting dan penguatan layanan kesehatan dasar.
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui pengurangan angka putus sekolah dan peningkatan rata-rata lama sekolah.
- Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan daya beli.
- Peningkatan akses bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat rentan.
- Pengembangan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada penguatan sektor unggulan daerah dengan langkah-langkah:

- Pengembangan sektor industri pengolahan dan hilirisasi produk unggulan daerah.
- Penguatan UMKM melalui akses permodalan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas usaha.
- Peningkatan iklim investasi melalui kemudahan perizinan dan kepastian usaha.
- Penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya dan pengembangan wirausaha.





- Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan baru.

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Upaya peningkatan IKLH dilakukan melalui penguatan pengelolaan lingkungan hidup dengan langkah-langkah:

- Pengendalian pencemaran air dan udara melalui pengawasan limbah industri dan domestik.
- Peningkatan pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Perluasan dan revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH).
- Rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan.
- Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Dengan adanya langkah-langkah yang lebih rinci pada masing-masing indikator tersebut, diharapkan perbaikan kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan sehingga capaian indikator di tahun mendatang dapat meningkat secara signifikan.



BAB V LAMPIRAN

5.1. Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBANDI, S.H., M.Kn
Jabatan : BUPATI SIDOARJO

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sidoarjo, 17 Nopember 2025



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	83,51
2.	Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo	Tingkat Kemiskinan	4,52%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	6,00%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,48%
4.	Menurunnya Ketimpangan Wilayah	Rasio Gini	0,326
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Digital	Indeks Reformasi Birokrasi	86,48
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata	Indeks Infrastruktur Daerah	0,858
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,08
8.	Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta Berkebudayaan	Indeks Kesalehan Sosial	87,35

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.539.004.120.021,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	883.598.442.774,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendidikan	655.399.077.247,00	APBD
	Program Pengendalian Perijinan	6.600.000,00	APBD
	Program Pengembangan Kebudayaan	2.154.807.085,00	APBD
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	600.000,00	APBD
2	DINAS KESEHATAN	605.689.216.043,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	359.172.294.059,00	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	224.929.130.260,00	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.595.079.624,00	APBD
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	600.391.700,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	17.392.320.400,00	APBD



3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	395.025.799.951,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.428.115.540,00	APBD
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air * (SDA)	24.733.315.012,00	APBD
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	79.441.745.820,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Jalan	270.422.623.579,00	APBD
4	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, Cipta Karya dan Tata Ruang	134.296.377.091,00	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.075.880.780,00	APBD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.197.233.215,00	APBD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	35.265.949.813,00	APBD
	Program Penataan Bangunan Gedung	20.918.655.581,00	APBD
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	300.000.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.398.789.107,00	APBD
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150.000.000,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.355.438.864,00	APBD
	Program Pengembangan Perumahan	7.344.005.588,00	APBD
	Program Kawasan Permukiman	52.500,00	APBD
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.932.017.500,00	APBD
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.333.693.937,00	APBD
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.800.000,00	APBD
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	900.000,00	APBD
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.736.349.819,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.948.482.605,00	APBD
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	13.787.867.214,00	APBD
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31.573.801.459,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.508.709.415,00	APBD
	Program Penanggulangan Bencana	2.819.022.705,00	APBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	13.246.069.339,00	APBD





7	DINAS SOSIAL	47.516.576.003,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.305.971.674,00	APBD
	Program Pemberdayaan Sosial	4.160.315.780,00	APBD
	Program Rehabilitasi Sosial	10.864.391.224,00	APBD
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.455.304.505,00	APBD
	Program Penanganan Bencana	730.592.620,00	APBD
8	DINAS TENAGA KERJA	24.284.301.474,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.846.347.025,00	APBD
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	93.366.350,00	APBD
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.512.558.844,00	APBD
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.123.172.332,00	APBD
	Program Hubungan Industrial	5.708.856.923,00	APBD
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10.450.000,00	APBD
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	49.672.544.448,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.668.602.703,00	APBD
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.877.085.927,00	APBD
	Program Perlindungan Perempuan	4.152.504.472,00	APBD
	Program Pemenuhan Hak Anak	537.545.000,00	APBD
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	25.060.920.450,00	APBD
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	3.686.855.550,00	APBD
	Program Pengendalian Kependudukan	4.129.930.346,00	APBD
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	48.400.837.409,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.440.465.339,00	APBD
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	13.087.500,00	APBD
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.444.982.500,00	APBD





	Program Penangan Kerawanan Pangan	509.308.565,00	APBD
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	607.701.240,00	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.259.407.121,00	APBD
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.391.713.563,00	APBD
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.188.670.456,00	APBD
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	295.505.297,00	APBD
	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.000.000,00	APBD
	Program Penyuluhan Pertanian	1.246.098.328,00	APBD
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	128.242.546.363,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.872.593.676,00	APBD
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.566.114.429,00	APBD
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	80.321.472.827,00	APBD
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	328.321.190,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	101.526.400,00	APBD
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	236.649.570,00	APBD
	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	2.625.000,00	APBD
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	508.053.443,00	APBD
	Program Pengelolaan Persampahan	9.305.189.828,00	APBD
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	19.812.326.838,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.875.522.588,00	APBD
	Program Pendaftaran Penduduk	414.841.270,00	APBD
	Program Pencatatan Sipil	588.168.121,00	APBD
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	876.069.859,00	APBD
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	57.725.000,00	APBD
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83.234.197.655,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.005.180.425,00	APBD





	Program Penataan Desa	3.751.667,00	APBD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	114.287.500,00	APBD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	11.173.152.185,00	APBD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	64.937.825.878,00	APBD
14	DINAS PERHUBUNGAN	138.266.106.326,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.174.769.429,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	103.277.771.982,00	APBD
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	9.774.815.890,00	APBD
	Program Pengelolaan Pelayaran	38.749.025,00	APBD
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45.673.179.742,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.339.587.541,00	APBD
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	5.637.889.948,00	APBD
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	21.458.051.751,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	597.447.681,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.011.761.230,00	APBD
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	19.774.316.425,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.683.193.855,00	APBD
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	5.040.000,00	APBD
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	5.092.500,00	APBD
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	17.492.445,00	APBD
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.926.076.830,00	APBD
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.595.303.599,00	APBD
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.637.926.014,00	APBD
	Program Pengembangan UMKM	2.904.191.182,00	APBD
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.049.572.862,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.825.438.228,00	APBD





	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.089.793.934,00	APBD
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	250.000.000,00	APBD
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	322.000.000,00	APBD
	Program Promosi Penanaman Modal	562.340.700,00	APBD
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	87.150.995.403,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.318.786.183,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan	7.939.213.350,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan	59.347.259.370,00	APBD
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.101.141.010,00	APBD
	Program Pemasaran Pariwisata	4.582.729.450,00	APBD
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	35.500.000,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	326.366.040,00	APBD
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.619.372.170,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.800.822.322,00	APBD
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.846.403.448,00	APBD
	Program Pengelolaan Arsip	955.721.840,00	APBD
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.625.000,00	APBD
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4.899.780,00	APBD
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	4.899.780,00	APBD
20	DINAS PERIKANAN	30.672.966.877,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.314.892.343,00	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	924.943.272,00	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	17.591.273.319,00	APBD
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	133.880.800,00	APBD
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.707.977.143,00	APBD





21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	59.443.813.143,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.706.315.966,00	APBD
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.868.538.324,00	APBD
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.087.275.000,00	APBD
	Program Pengembangan Ekspor	3.822.868.706,00	APBD
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	366.036.003,00	APBD
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8.418.804.144,00	APBD
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	83.450.000,00	APBD
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	90.525.000,00	APBD
22	SEKRETARIAT DAERAH	119.072.563.128,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.696.223.883,00	APBD
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	29.608.728.715,00	APBD
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.767.610.530,00	APBD
23	SEKRETARIAT DPRD	95.785.539.249,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.121.280.171,00	APBD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	33.664.259.078,00	APBD
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.242.796.113,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.856.250.699,00	APBD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.379.800.924,00	APBD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.723.429.070,00	APBD
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.280.550.420,00	APBD
	Program Riset dan Inovasi Daerah	2.765.000,00	APBD
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	817.443.359.349,200	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.377.927.325,20	APBD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	792.003.345.012,00	APBD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.062.087.012,00	APBD





26	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	41.908.110.334,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.766.673.665,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.141.436.669,00	APBD
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22.290.348.934,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.100.736.490,00	APBD
	Program Kepegawaian Daerah	4.003.300.482,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.186.311.962,00	APBD
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	78.820.305.204,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.486.485.745,00	APBD
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.229.141.000,00	APBD
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20.064.097.770,00	APBD
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	46.444.850.689,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	6.000.000,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.589.730.000,00	APBD
29	INSPEKTORAT	28.309.841.480,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.191.339.810,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.118.501.670,00	APBD
30	KECAMATAN SIDOARJO	22.135.064.867,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.508.491.139,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	455.563.728,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	149.110.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.900.000,00	APBD
31	KECAMATAN CANDI	6.087.249.618,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.431.699.948,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	562.923.570,00	APBD





	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.138.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.610.000,00	APBD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.878.100,00	APBD
32	KECAMATAN BUDURAN	7.874.484.580,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.099.791.230,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	720.580.850,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.937.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.375.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.800.000,00	APBD
33	KECAMATAN WONOAYU	6.152.257.784,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.509.883.664,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	491.673.920,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	53.362.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	88.937.700,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000,00	APBD
34	KECAMATAN KRIAN	10.839.820.066,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.023.429.410,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	555.471.667,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	108.165.513,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	124.584.226,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.169.250,00	APBD
35	KECAMATAN PORONG	9.229.711.849,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.606.250.703,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	537.792.446,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.175.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.443.700,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.050.000,00	APBD





36	KECAMATAN KREMBUNG	6.073.832.284,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.388.917.838,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	540.679.590,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	40.935.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.924.856,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.375.000,00	APBD
37	KECAMATAN JABON	6.007.872.310,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.383.816.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	464.205.731,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	42.960.325,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	104.402.850,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.487.404,00	APBD
38	KECAMATAN BALONGBENDO	6.658.998.943,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.040.997.943,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	487.445.000,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.500.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.056.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	APBD
39	KECAMATAN TARIK	6.273.345.209,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.473.162.970,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	450.008.750,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	175.860.250,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	164.763.239,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.550.000,00	APBD
40	KECAMATAN TAMAN	16.748.653.462,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.967.096.638,00	APBD





	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	619.991.074,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.875.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	128.065.750,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.625.000,00	APBD
41	KECAMATAN WARU	7.694.297.539,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.697.014.735,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	780.799.965,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.288.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.232.339,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.962.500,00	APBD
42	KECAMATAN GEDANGAN	7.877.051.047,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.740.626.934,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	756.014.213,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	117.250.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.009.900,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	187.150.000,00	APBD
43	KECAMATAN SEDATI	6.880.717.635,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.967.422.483,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	690.094.690,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	46.112.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	161.882.962,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.205.000,00	APBD
44	KECAMATAN TANGGULANGIN	6.297.358.150,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.642.193.598,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	528.357.052,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.337.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.970.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	APBD





45	KECAMATAN TULANGAN	6.656.957.364,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.797.473.452,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	538.076.928,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	32.825.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	242.206.984,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.375.000,00	APBD
46	KECAMATAN PRAMBON	6.991.063.843,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.372.228.075,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	540.603.618,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.195.200,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.038.950,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000,00	APBD
47	KECAMATAN SUKODONO	7.796.293.141,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.005.915.670,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	477.115.571,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	182.290.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	113.721.900,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.250.000,00	APBD
	TOTAL ANGGARAN	6.066.749.190.287,20	

Sidoarjo, 17 Nopember 2025

BUPATI SIDOARJO

SUPANDI, S.H., M.Kn



5.2. IKU dan IKD



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/542 /438.1.1.3/2022

TENTANG

**INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH SERTA 17 PROGRAM STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja dan berorientasi hasil percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah serta 17 Program Strategis, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Informasi Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Serta 17 Program Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

5.3. RPJMD



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5.4. Penghargaan

1. 17 April 2025

Mendapat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke 12 dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.



2. 25 April 2025

Meraih Penghargaan Tingkat Nasional Kategori Kabupaten Dengan Capaian Tertinggi Pelaksanaan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, di Plaza Insan Prestasi Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta.



3. 28 April 2025

Meraih Penghargaan Sebagai Kabupaten Terbaik I dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dari Gubernur Jawa Timur, di Surabaya.



4. 8 Agustus 2025

Meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi di Jakarta.



5. 22 Oktober 2025

Meraih Penghargaan Penyelenggaraan Kearsipan Kategori AA (Sangat Memuaskan) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta.

6. 18 November 2025

Meraih Penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) Kategori Inovasi dari Badan Informasi Geospasial dari Deputy Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, M. Prof. Econ, Ph.D di Auditorium Sukarman Lt. 2 Perpustakaan Nasional RI untuk aplikasi E-Kenda.

7. 30 November 2025

Meraih Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kategori Madya Terbaik Tingkat 1 Nasional pada ajang Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dan STBM Award Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.



8. 26 November 2025

Sekda Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, S.KM., M.Kes. resmi meraih Juara 1 Sekda Terbaik pada ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025! Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada pemimpin daerah yang sukses mendorong percepatan transformasi digital di pemerintahan.



9. 25 November 2025

Meraih JUARA 1 (Medali Kanaka) dalam Anugerah Bhumandala Award 2025 tingkat Kabupaten seluruh Indonesia dalam event yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial.



10. 13 Desember 2025

Meraih Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sebagai Kabupaten Terinovatif.

